



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI VIII DPR RI  
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2021-2022  
**Masa Persidangan** : 1  
**Rapat Ke** : 6  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Dengan** : Menteri Sosial RI  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Rabu, 25 Agustus 2021  
**Waktu** : 10.00 WIB s.d. 13.38 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, PT 10270
- Acara** : 1. Penyesuaian, Penggunaan Atau *Refocusing* Kebijakan APBN Tahun 2021, Serta.  
2. Permasalahan Isu-Isu Aktual dan solusinya.
- Ketua Rapat** : H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)  
**Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 26 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI  
**Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN:**  
1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)  
2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si (F-PDIP)  
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-P. Golkar)
- ANGGOTA:**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
4. Paryono, S.H., M.H.  
**FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
5. Muhammad Ali Ridha  
**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
6. H. Husni, S.E., M.M.  
7. Dr. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.  
**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**  
8. Hj. Sri Wulan, S.E., M.M.  
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
9. H. Maman Imanul Haq  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
10. Drs. H. Achmad, M.Si..  
**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
11. K.H. Bukhori, Lc., MA.  
**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
12. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
13. K.H. Muslich Zainal Abidin

- Anggota yang Izin** : 1. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai Gerindra)  
2. Ina Ammania  
3. H. Nasril Bahar, S.E.
- Undangan** : Menteri Sosial RI beserta jajaran

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

Izin bapak ibu kita mau mulai.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh jajaran,  
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, baik yang hadir secara fisik di ruangan Komisi VIII maupun yang hadir secara virtual. Sesuai dengan peraturan dari kebijakan Pimpinan DPR bahwa maksimal 20% yang hadir secara fisik di tengah pemberlakuan PPKM, dan

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Mengawali Rapat Kerja hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan, atau mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Sebagaimana biasa Bu Menteri dan para jajaran beserta seluruh Pimpinan dan Anggota di Komisi VIII sebelum kita memulai semua rangkaian rapat pada hari ini, mudah-mudahan rapat hari ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan tujuan kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam mari kita baca ummul Kitab Al Fatihah.

**(BERDO'A)**

Selesai.

**BERDOA'A SLESAI**

Bu Menteri yang saya hormati,

Para Pimpinan dan para Anggota.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2021 – 2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 13 Juli 2001, dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII tanggal 18 Agustus 2001, maka pada hari ini Rabu tanggal 26 tahun 2021 Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan agenda Penyesuaian, Penggunaan atau *Refocusing* Kebijakan APBN Tahun 2021, serta Isu-Isu Aktual.

Sebelum rapat ini kita lanjutkan saya ingin menyampaikan, ini ada anggota baru di Bu Menteri, mudah-mudahan ada di virtual ini Pak Nasril Bahar, Pak Nasril Bahar ini sudah 4 periode menjadi anggota DPR, tiga periode lebih di Komisi VI. Jadi ini pemain lama di Komisi VI, pindah ke Komisi VIII ada nggak Pak Nasril ini? Dari Fraksi PAN asalnya dari Dapil Sumatera Utara 3, mudah-mudahan Pak Nasril bisa bersama-sama kita, untuk melanjutkan pengabdianya di DPR bersama pemerintah. Dan tentu pengalaman di Komisi VI bisa menjadi bekal juga untuk sama-sama kita bekerja sama di Komisi VIII.

Baik Bu, menteri berdasarkan laporan rapat pada hari ini sudah dihadiri secara fisik ada 12 orang, secara virtual 35 orang, dari 9 fraksi, oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai, maka atas persetujuan ibu Menteri dan Pimpinan serta Anggota Komisi VIII izinkan kami membuka rapat kerja ini.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini kami buka dan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB.)**

Baik, agenda pada hari ini yaitu:

1. Yang pertama pengantar dari Pimpinan rapat;
2. Yang kedua penjelasan dari Menteri Sosial tentang agenda yang sudah saya sebutkan tadi yaitu khusus *refocusing* dan tentu ada isu-isu aktual yang perlu kita carikan solusinya;
3. Yang ketiga respons atau tanya jawab dari Anggota;
4. Keempat kita akan menarik sebuah kesimpulan; dan
5. Yang kelima penutup.

Apakah agenda yang saya bacakan bisa disetujui?

Setuju ya?

### **(RAPAT: SETUJU)**

Baik kita mulai rapat pukul 10.25 WIB kita akhiri sampai jam 12.00 WIB ya, setuju ya?

### **(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

Bu Menteri yang saya hormati.

Rapat Kerja dengan agenda pembahasan *refocusing* anggaran Kementerian Sosial ini sangat penting dan strategis, karena membahas alokasi anggaran yang merupakan cerminan dari perwujudan dan perlindungan serta pemenuhan hak masyarakat, yang dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (2) *Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar setiap warga negara dapat hidup layak, sejahtera sesuai dengan harkat dan martabat manusia Indonesia, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Atau dengan kata lain pemerintah berkewajiban memberikan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia pada tanggal 23 September tahun 2020 yang lalu, telah disepakati bahwa penyesuaian anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp92.817.590.291.000,-. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi VIII, khususnya mengenai anggaran, maka pada hari ini kami ingin menyampaikan begitu pentingnya rapat hari ini yang isunya pengurangan Bu menteri. Pengurangan anggaran, semua kementerian dikurangi anggarannya Bapak/Ibu termasuk Menteri Sosial.

Oleh karena itu kita berharap dari Komisi VIII memberikan respons atau dukungan penuh kepada Kementerian Sosial yang memang harus hadir di tengah sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang menggugah kita semua, di antaranya bencana nasional seperti pandemi Covid-19, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya, yang menyebabkan banyak orang yang semula tidak miskin menjadi miskin. Dan bilamana anggaran Kementerian Sosial dikurangi justru itu membuat goncangan bagi pelayanan kita terhadap masyarakat yang memang harus kita bantu di tengah-tengah mereka kesulitan. Apalagi kita dengar peran Bu Menteri sangat mulia untuk mengangkat derajat para yatim piatu yang apa namanya kehilangan orang tuanya karena pandemi, atau karena terpapar Covid-19.

Oleh karena itu dari meja Pimpinan Bu Menteri, kalau kami pasti tidak setuju adanya pengurangan anggaran, justru kami usulkan ditambah Bu Menteri, karena anggaran yang sekarang pasti juga tidak cukup, apalagi kalau dikurangkan. Oleh karena itu kita dengarkan nanti paparan dari Ibu Menteri, dan kita yakin Bu Menteri ini pejuang untuk orang-orang yang terpinggirkan, atau orang yang perlu dilayani, mudah-mudahan komitmen antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial bisa bersinergi dengan baik, sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, bendahara negara tidak memukul rata Bu Menteri. Ya, kalau kebijakan nasional karena memang kondisi keuangan kita tidak sulit, tapi jangan kondisi sulit ini mempersulit orang lain Bu Menteri, artinya orang-orang miskin yang harus dilayani justru menjadi terabaikan karena Kementerian Sosial dikurangi anggarannya, kalau saya tidak salah hampir Rp3.000.000.000.000,-. Nah kalau itu tidak dikurangi atau justru ditambah Rp3.000.000.000.000,- ya saya kira sebuah kabar gembira, atau kado terindah buat kaum miskin dan orang-orang yang perlu kita layani.

Sekali lagi dari meja Pimpinan dan seluruh Anggota, kami berkeyakinan bahwa kami berkeinginan untuk tidak ada pengurangan anggaran di Kementerian Sosial dan kalau perlu ditambah, untuk terus kita tanpa henti untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang memang perlu kita layani. Oleh karena itu

dalam rapat penting ini, perlu kami menyampaikan kepada Bu Menteri kira-kira apa saja yang akan di *refocusing* di Kementerian Sosial? Mungkin ada pergeseran anggaran, atau pengelola anggaran di sisi 1, tapi di tambah ke bagian lain, itu mungkin perlu disampaikan kepada kami, termasuk mungkin hambatan dan tantangan bilamana pengurangan anggaran itu benar-benar terjadi Bu ya. *Refocusing* dari Kementerian Keuangan itu benar-benar terjadi, bagaimana situasi atau pengaruh terhadap arah ataupun target dari Kementerian Sosial di tahun 2021. Tentu yang terakhir kami juga ingin menyampaikan kepada Bu Menteri bagaimana respons Kementerian Sosial terhadap bencana di tanah air, ya seperti pandemi masih berlangsung, banyak juga banjir sekarang, longsor dan lain sebagainya, itu semua perlu menjadi perhatian kita dan tidak terlepas dari hadirnya negara dalam bentuk kebijakan anggaran.

Saya kira itu Bu Menteri pengantar dari kami untuk selanjutnya kami persilakan dengan hormat, penjelasan Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Ibu Risma kami persilakan.

### **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim,  
*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang, Syaloom, Om swastiastu, Namu Budaya,  
Salam kebajikan, rahayu.

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI,  
Yang kami hormati para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,  
Yang saya hormati para Anggota Komisi VIII DPR RI, dan  
Para pejabat dari Kementerian Sosial.  
Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Mengawali pertemuan pertama marilah kita panjatkan ke haridat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga kami dapat memenuhi undangan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Rabu, 25 Agustus 2021. Dengan agenda penyesuaian penggunaan atau *refocusing* kebijakan APBN tahun 2021, dan isu-isu aktual dan alternatif solusinya.

Pimpinan sidang, Bapak/Ibu dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Kami perlu menyampaikan bahwa telah dilakukan *refocusing* anggaran di Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021, yang pertama adalah tahap I, Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp374.594.502.000,-. Kemudian tahap II dilakukan lagi *refocusing* dengan surat Menkeu tanggal 18 Mei 2021 sebesar Rp31.659.222.000,- kemudian yang tahap III juga dilakukan *refocusing* tanggal 6 Juli 2021 sebesar Rp3.184.866.242.000,-. Kemudian yang berikutnya tahap ke IV juga dilakukan *refocusing* tanggal 20 Juli 2021 sebesar Rp147.728.449.000,- kemudian ini ada usulan lagi untuk kami melakukan *refocusing*, totalnya kurang lebih Rp3.300.000.000.000,- namun kemudian kami hanya bisa melakukan Rp1.200.000.000.000,- karena apa? Karena kalau ini kami lakukan *refocusing* 3.300.000.000.000,- seluruh gaji pegawai juga katut bapak.

Jadi karena itu kemudian tadi pagi kami rapat dengan DJA alhamdulillah disepakati kami tidak dipotong 3.300.000.000.000,- Jadi kalau kita lihat komposisinya bapak Pimpinan, itu per jenis belanja tolong, jadi sebetulnya yang disebut belanja barang itu Rp5.000.000.000.000,- sekian, itu sebagian besar adalah kami tidak, kami dulu di awal anggaran ada pembangunan untuk gedung parkir. Kemudian ada gedung arsip, itu sudah kami rubah, tidak ada kami tidak membangun, ini hanya perbaikan di balai-balai kami yang memang kondisinya rusak itupun kami prioritaskan yang rusak berat. Namun belanja barang ini sebagian besar kita alokasikan untuk pengadaan kursi roda elektrik, kemudian ada berapa ya jumlahnya? Ada tidak di paparannya? Tolong yang paparan ini mungkin yang paparan 12 ya, yang halaman 12 iya. Nah kami membuat ini kursi roda elektrik yang dikerjakan oleh para saudara-saudara kita yang juga disabilitas.

Jadi itu masuk belanja barang, karena kami tidak bisa merealokasikan untuk belanja yang lain karena, karena harus melalui DPR pak, tapi kami rubah bentuknya yang dari pembangunan itu menjadi ini. Saat ini yang kita akan jadikan adalah kurang lebih 6.581 unit, jadi untuk kursi roda elektrik itu 757 unit, kemudian motor niaga roda 3 ada tidak fotonya? Kemudian tongkat adaptif ini untuk tuna netra Pak. Jadi kami rubah apa? Anggarannya, jadi bukan kami membangun bukan, tapi sebagian besar kita alokasikan untuk ini, untuk apa namanya? Untuk kita menangani untuk saudara-saudara kita yang disabilitas dan mereka yang mengerjakan sendiri juga. Jadi saudara-saudara kita yang disabilitas itulah yang mereka mengerjakan sendiri. Jadi kami untuk kursi roda itu kami juga memiliki kursi roda untuk *cerebral palsy*, jadi yang selama ini hanya dia bisa tidur, saat ini mereka bisa duduk, dan bisa berdiri. Itu sudah jadi ibu, sudah jadi sebagian belum seluruhnya.

Nah kemudian yang berikutnya belanja barang ini seolah-olah besar Rp2.000.000.000.000,- sekian, tapi sebenarnya kita gunakan sebagian untuk ini. Nah yang berikutnya itu kemarin saya karena balai, saya sudah pernah presentasikan ini di Komisi VIII, balai itu kita rubah fungsinya menjadi balai yang melayani seluruhnya. Kalau dulu itu misalkan balai untuk lansia itu hanya lansia saja, tapi kemudian ada orang ODGJ misalkan didaerah itu mereka tidak bisa menangani, karena ODGJ harus misalkan kejadiannya sekarang ini kita menangani banyak itu di Jawa Barat di mana ya? Yang ODGJ itu, Sukabumi banyak sekali, ada dipasung, kita bebaskan di pasung itu banyak sekali, nah tapi kita tidak punya untuk ODGJ di Jawa Barat, harus dibawa ke Pati. Pak Jawa Barat ada ya Pati? Iya, nah harus dibawa seperti itu, padahal mungkin ada balai terdekat disitu, masalahnya kemudian kalau yang kena itu anak-anak biasanya orang tuanya nggak boleh. Jadi karena itu kenapa kemudian balai-balai kita, kita fungsikan mereka sebagai balai semua pemerlu kesejahteraan sosial, jadi semua harus bisa nangani. Jadi seperti di daerah NTT itu sekarang banyak sekali kita temukan juga yang dipasung ODGJ, sekarang kita rubah yang NTT itu semula hanya untuk anak, ini kita alokasikan sebagian untuk ODGJ juga menangani ODGJ Naibonat, di Naibonat.

Ini kami merelokasi anggaran itu untuk kebutuhan-kebutuhan tadi, untuk kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan tadi, ODGJ bahkan sekarang ini Pak kami menangani yang Covid, anak-anak yatim piatu Covid itu dari anggaran ini. Kami belum ada anggaran memang untuk khusus anak yatim, tapi kami mencoba menanganinya dengan anggaran dari atensi ini, dari balai-balai kami. Jadi kami menangani beberapa anak yang kena Covid itu sekarang ini dengan anggaran itu,

jadi apa namanya? Saya mencoba bagaimana dengan anggaran yang kondisinya sangat terbatas tapi bisa bisa maksimal untuk menangani permasalahan-permasalahan, meskipun, meskipun belum sempurna betul. Kami tahu karena contohnya misalkan gak bisa ditunda lagi anak-anak yatim yang kemudian tiba-tiba harus menjadi yatim piatu karena orang tuanya kena komplit meninggal kemudian kami tidak, kami diam saja. Nah ini sekarang kami tangani dengan dana ini, dana operasional dari balai-balai kami.

**KETUA RAPAT:**

Jumlahnya berapa Bu?

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Kenapa?

**KETUA KETUA RAPAT:**

Jumlah rupiahnya berapa?

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Jumlah rupiahnya berapa itu? Di catatannya ada, tidak banyak pak ada Rp3.200.000.000,- pak. Tapi kami berusaha memaksimalkan dengan dana itu pak. Itu usulan kita nantinya pak, usulan untuk 2022 untuk anak yatim seluruhnya itu, tapi yang sekarang ini, yang sekarang dong mbak, yang sekarang berapa? Ada tidak? Ada Rp2.400.000.000,- itu yang kita bisa coba sisihkan pak, karena sekarang ini sudah tidak bisa contohnya misalkan yang tadi dimana itu, Cianjur begitu ODGJ sudah kami tangani saja pak, kami ambil alih kita tangani langsung, jadi ini untuk kita, nah ini Pak roda tiga, ini kita buat sendiri Pak. Ini kita buat sendiri dan yang membuat mereka disabilitas, jadi silakan nanti kalau ada apa namanya? Yang membutuhkan ini pak.

Terus lanjut yang lain, yang tongkat, yang itu, jadi tongkat itu yang tongkat adaptif itu Pak, itu ada GPS-nya, jadi kalau dia kesusahan ke mana keluarganya tuh bisa mencari. Kemudian kalau di depannya tuh ada asap, ada barang, itu langsung bunyi tongkatnya. Ada nggak yang apa, kursi roda untuk *cerebral palsy* sama itu ya yang bisa berdiri itu? tidak ada ya, jadi itu pak, jadi kami besar bukan kami belanjakan kami nggak bangun sama sekali sekarang ini, bahkan bocor-bocor yang kita lakukan untuk perbaikan biasa, tapi kita memang konsentrasi untuk menangani masalah-masalah ini seperti itu.

Nah kemudian nah ini nggak bisa yang di bawah tolong kembali di halaman berapa ini? Yang *refocusing* anggaran Kementerian Sosial tolong kembali itu kami nggak bisa otak-atik Pak yang Rp2.000.000.000.000,- itu adalah bantuan sosial, kami nggak bisa apapun itu karena memang iya yang di apa sebelumnya betul itu tadi, betul yang tadi itu yang nah ini yang Rp22.000.000.000.000,- itu kami nggak bisa apa-apa pak. Kenapa? Karena ya itu tadi bantuan, nanti saya jelaskan bapak,

jadi lanjut di halaman penambahan anggaran, jadi penambahan setelah itu nah ini. Nah kita diberikan anggaran untuk BST yang sudah kita serahkan kemarin itu untuk 2 bulan Rp2.300.000.000.000,- kemudian ada dalam ini untuk juga kami diberikan bantuan untuk kartu sembako BPMT, itu kami diberikan, mohon maaf Pak, Bapak nanya ini program gimana ini kami hanya terima apa namanya given dari Kementerian Keuangan. Jadi ada penambahan 2 bulan untuk BPMT yang apa namanya atau sembako 2 bulan, yang saya akan jadwalkan Bulan September itu, kalau di WA Bapak Ibu mendengar itu saya kan kita kan jadwalkan di bulan September jadi ini 2 bulan Pak jadi Rp200.000 kali jumlah 18.800.000 juta itu given bu, saya Kami tidak, tidak tahu apa namanya ini diberikan begitu.

Kemudian yang berikutnya itu ada kartu sembako ini usulan dari daerah, yang masuk ke kita usulannya kurang lebih jumlahnya itu 5.900.000 KPM. Ini kita coba usulkan ke Kementerian Keuangan dan disetujui, mereka akan menerima bantuan selama 6 bulan, jadi mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 6 bulan. Nah ini ada yang sudah jadi, kalau kemarin bapak oh Juli sampai dengan tidak ini 6 bulan, 6 bulan salah, salah sampai Desember 6 bulan to? Iya 6 bulan iya 2021 ini pak, tidak bukan 2021 ini yang baru.

#### **KETUA RAPAT:**

Maksudnya yang tertulis salah itu bu.

#### **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Iya salah mohon maaf, salah iya. kalau yang atas benar 2 bulan, yang bawah itu 6 bulan. Kenapa Bu? Iya Bu mohon maaf tadi soalnya pagi mau ngecek terus emosi Jadi mohon maaf pak. Jadi seperti itu pak, jadi totalnya Rp7.080.000.000.000,- itu yang untuk 5,6 juta balai. Masalahnya itu prosesnya di bank itu bisa sampai proses cetak kartu, pembagian, itu bisa sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Saya sudah minta untuk percepatan tapi tidak bisa, minimal waktunya itu, seperti itu.

Nah kemudian kita beberapa relokasi untuk bencana pak, jadi kita beli truk yang kemarin itu di daerah mana Kerawang saya tunggu sampai jam 1 malam kok nggak datang-datang, ternyata truknya mogok. Jadi saya tunggu sampai jam 3 pagi, akhirnya kita udah kita beli truk saja untuk beli truk, kita beli truk 3 bapak. Kemudian itu jadi sebagian kita gunakan untuk bencana, kemudian jadi ini Pak yang tolong yang dampak sosial pandemi, kita sudah lakukan ini yang bencana, kemudian yang dampak sosial pandemi, nah ini pak yang tadi Rp3.200.000.000.000,- itu Rp3.200.000.000.000,- ini yang kita alokasikan untuk anak-anak yatim yang, yang orang tuanya meninggal karena Covid.

#### **KETUA RAPAT:**

Usulan tahun depan Bu?

## **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Tidak Pak, ini saya revisi pakai anggaran itu Pak, yang dulu awalnya untuk bangun-bangun itu lho pak, terus kita revisi untuk ini pak. 3,2 ya saat ini kami lagi meminta datanya belum lengkap dari daerah memasukkan ke kita, yang kita tahu baru sekitar 15.000 sampai 16.000, yang kita tahu tapi nanti yang 2022 kami mengusulkan seluruh anak yatim pak, seluruh untuk anak yatim untuk yang 2022. Ini kan nggak bisa anggarannya pak, jadi kalau di *support* Komisi VIII saya akan ajukan Pak, kalau di *support* Pak, saya akan mengajukan, saya berani saja, saya kalau tidak kan saya enggak kan, saya izin kalau di *support* saya akan mengajukan untuk taruhlah 3 bulan gitu ya Pak, 3 bulan untuk anak yatim ya, karena kan butuh proses administrasi juga. 3 bulan itu berarti bulan Oktober, November, Desember iya Pak. Bagaimana Pak?

Ya saya akan mengajukan itu, mengusulkan iya jadi totalnya didata kami sekitar 4 juta sekian. Iya nanti hitungannya berapa? Bukan pak, ini bukan apa namanya? Iya nanti ini bukan apa namanya nanti kami hitung pak, jadi kemarin usulannya Pak mana presentasimu aku minta yang kemarin itu lho yang 300.000 itu loh, nanti saya akan kami mengusulkan ini baru dari Pak Sekjen Pak, mana oh 4 bulan. Jadi gini Pak, jadi hitungannya Pak, estimasinya kami masih dapat terima 15.000 sampai 16.000 anak ditinggal orang tuanya karena Covid. Itu yang Covid, dihitung, diprediksi yang belum sekolah kurang lebih 6.000 anak, itu usulannya yang belum sekolah itu Rp300.000,- per bulan. Kemudian yang sudah sekolah itu Rp200.000,- nanti bapak koreksi ini kami hanya usulan kami, itu kurang lebih 14.000 anak, ini yang Covid.

Kemudian anak-anak yang diasuh oleh lembaga Kesejahteraan Sosial Anak itu kurang lebih belum sekolah itu 4.000 anak dengan, bantuan Rp300.000,- kemudian yang sudah sekolah 41.000 anak dengan bantuan Rp200.000,- anak ini sesuai standarnya PKH Pak, kalau PKH standarnya begini. Kemudian anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu, jadi anak yatim ini pak, itu kurang lebih 3 juta sekian, jadi kalau yang di atas itu LKS yang huruf kedua 3.978.622 anak ini, usulan kami kemarin 4 bulan, tapi kalau rasanya kalau 4 bulan berarti kan September, Oktober, November, Desember nggak keburu mungkin 3 bulan. Nah sementara anak-anak yang Covid itu ditangani pakai atensi itu yang Rp2.400.000.000,- totalnya, kebutuhannya untuk 4 bulan, untuk anak yatim dan anak korban Covid itu Rp3.000.000.000.000,- 4 bulan ini pak, kita akan hitung lagi kalau 2 bulan, Rp3.238.897.600.000,- seperti itu ini untuk anak yatim.

Seperti itu kira-kira bapak jadi apa namanya? Program yang kita lakukan, nah memang masih ada yang belum dibuka apa namanya diblokir, anggaran kami ada yang belum di, ada yang masih diblokir Propus itu sebesar berapa Pak? Rp2.000.000.000,- itu kemarin saya coba ber kirim surat ke menteri Bappenas untuk dibuka blokirnya untuk pemberdayaan. Sudah ya, ini Pak datanya ini, jadi hitungan kami kemarin 4 bulan, jadi anak yang meninggal karena orang tuanya kena Covid hitungan kita asumsi kita 20.000, saat ini kami baru terima 15.000 belum seluruhnya, belum seluruhnya ngumpul ke kami.

**WAKIL KETUA KOMISI VIII/F-PG (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Jangan pakai asumsi Bu. Karena ini kan menyangkut dengan data ya, data dan menyangkut dengan angka, kalau kita memakai asumsi nanti sulit kita untuk memberikan dukungan terhadap data-data itu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Iya kami masih meminta surat ke daerah pak, data persisnya, daerah belum seluruhnya, belum seluruhnya *ngumpul* ke kami, iya masih proses tapi kan kalau ini misalkan harus misalkan nanti 3 bulan Oktober kami harus mengajukannya ke Kementerian Keuangan bulan ini Pak, karena tidak keburu kalau bulan September.

**F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Pimpinan, tadi Bu menteri menjelaskan tadi data, inikan data tidak ada disini, jadi dari sekretariat bisa kirim ke sekretariat kita biar langsung di *print* jadi kalau kita bicara masalah data kita jadi lihat disini juga lihat di situ, jangan sampai nanti kita berasumsi salah dan kita catat salah, karena kan ini penting sekali. Terima kasih ketua.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Seperti itu Pak, karena kami kemarin kalau kami harus mengusulkan untuk misalkan 3 bulan, itu harus kami mengusulkan ini sementara dari daerah banyak yang belum masuk. Biasanya daerah itu begitu nanti ada program, langsung mereka masuk-masukkan begitu, tapi kalau belum ada mungkin mereka belum, belum banyak respon gitu. Kami sudah buat edaran tanggal berapa ya pak Hari? Ke daerah untuk meminta data itu, yang masuk itu baru sekitar 15.000 sekian seperti itu, seperti itu Pak.

**F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Mungkin nanti bukan asumsi namanya ya Bu, jadi kondisi, kondisi yang ada karena itu situasinya akan berkembang, kawatirnya yang disebutkan Pak Ace itu kalau asumsi kan tidak baik kalau untuk data, penyebutannya bukan asumsi, kondisi yang diperhitungkan ke 3 bulan ke depan kira-kira itu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Ya kira-kira seperti itu Pak.

**F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Iya kalau asumsi kan memang ibu buat, jadi kan.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Sekarang sudah kumpul itu 15.000 sekian. Berkembang Pak, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan kita juga tidak tahu.

**WAKIL KETUA KOMISI VIII/F-PG (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Ya misalnya kita ambil ya, data terakhir dari yang meninggal akibat pandemi Covid itu 128.000 orang se Indonesia kan harus ditelusuri juga, mereka punya anak di bawah yang masih sekolah atau tidak dan lain-lain. Nah kalau kita berangkatnya dari asumsi data yang faktual pada saat kita memberikan dukungan terhadap anggaran, tentu ini harus *up to date*, kalau tidak Bu *haduh* nanti kita yang disalahin juga, kenapa DPR katanya memberikan dukungan tapi nggak tahu angka faktualnya. Nah bahaya juga nanti kita bu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Iya Pak, baik Bapak jadi ini memang data dari daerah belum selesai masuk, data di kami baru 15.000, memang seperti itu, karena tidak bisa compare gini Pak, karena kadang-kadang yang meninggal karena Covid itu kan juga lansia begitu. Jadi mungkin sudah nggak punya itu,

**WAKIL KETUA KOMISI VIII/F-PG (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Yang saya bilang tadi pada umumnya mereka adalah misalnya kondisi, artinya mereka yang lagi lansia, lansia tentu tidak semuanya memiliki anak di bawah umur, jadi karena itu ndak bisa kemudian kita memakai asumsi-asumsi. Tapi prinsip bahwa kami mendukung agar anak yatim piatu korban Covid harus diperhatikan oleh negara hingga usia dewasa pendidikannya selesai, ya kita pasti dukung, hanya dipastikan kepada siapa nanti akan misalnya dikirim bantuan sosialnya, biaya pendidikannya. Apakah Kementerian Sosial mau untuk membuat balai-balai khusus kepada mereka dan lain-lain diintegrasikan dengan program atensi dan lain-lain. Jadi harus *clear* begitu, berangkatnya dari data. Terima kasih.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Terima kasih Bapak, kita siapkan nanti mungkin saya akan presentasikan lengkap saja, tapi kalau misalkan, kalau misalkan nanti kita hitung pak karena prosesnya pasti di Kementerian Keuangan juga tidak apa namanya tidak pendek. Kalau saya usulkan 3 bulan Oktober, misalkan kita mulai Oktober berarti sekarang harus, karena bank taruhlah nanti kita pakai PT Pos satu bulan butuh proses untuk menyiapkan apa namanya? Menyiapkan untuk proses administrasi itu.

Karena kalau tidak, nanti terlambat apa tidak bisa di akhir tahun kan tidak bisa Tahun Anggaran kan tutup begitu kalau melebihi tahun. Jadi seperti itu pak, kita terus tagih ke daerah cuma memang belum semuanya masuk, seperti itu pak.

#### **ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Terus yang kedua Bu, juga harus dibuat skema, keterlibatan pemerintah daerah tidak bisa ini semua di sosial, misalnya sama apa itu kan di daerah pun juga ada panti-panti sosial, ada dinas-dinas sosial yang juga penting untuk diberdayakan.

#### **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Betul Bapak, jadi begini Bapak dampak pandemi ini dampaknya juga yayasan-yayasan itu berat, karena sumbangan itu turun, kami bantu di beberapa termasuk kalau nggak salah laporan dari apa Komisi VIII itu ada yayasan yang berat kondisinya, kemarin kita *support* akhirnya. Jadi karena itu kenapa Pak kita masukkan ini? Kita masukkan yang mohon maaf yang ada di situ kita masukkan jadi yang ada di LKS itu kita masukkan, jadi yang di LKS itu, yang di LKS itu yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kenapa kita masukkan juga di situ? Jadi karena memang anak-anak yang di situ sekarang pada juga lembaga-lembaga ini berat, karena yang *nyumbang* itu juga turun begitu Pak. Jadi makanya kita pikirkan juga itu gitu.

Jadi sehingga nanti kita perbantukan, kita bantu kan di lembaga ini kalau misalkan dia merawat 7 anak, ya sudah 7 anak kali dia sudah sekolah apa belum, gitu aja Pak seperti itu kira-kira Pak. Makanya kita masukkan ini, kita juga masukkan itu, jadi anak yang dirawat keluarganya miskin, ada yang gak mau jadi seperti yang itu siapa itu yang di Kalimantan itu yang kita pertemukan dengan neneknya, kakeknya o iya Novi, Novi itu kita jemput neneknya ngotot saja padahal anaknya masuknya tidak mampu, ngotot saja mau merawat ya sudah apa namanya nanti kita bantu nah totalnya itu Rp3.000.000,- ini, nah Rp3.000.000,- itu Rp3.978.000,- itu yang begitu, model begitu yang tadi.

Kemudian kami juga menyiapkan di balai-balai kami saat ini menyiapkan untuk anak yang memang tidak ada yang menangani, kami juga sedang siapkan saat ini. Jadi yang itu yang jadi seperti itu pak, jadi karena itu apa namanya banyak, banyak yang yayasan-yayasan pun sekarang mulai apa kurang, karena mereka juga yang *nyumbang* turun begitu, seperti itu. Jadi kenapa kemudian kita masukkan juga, sekarang itu Pak daerah itu menyerahkan untuk yang BPJS itu Pak yang dulu di dirawat daerah, sekarang diserahkan semua ke pusat. Jadi kami menerima dari beberapa daerah mereka nggak mampu, jadi kami menangani data itu juga sekarang untuk kita serahkan ke Kementerian Kesehatan.

#### **ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Pimpinan, boleh?

## **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bu menteri atas penjelasannya, saya ulangi ada 4 kali *refocusing* tahap 1 sampai tahap 4 sesuai dengan surat Menteri Keuangan totalnya Rp1.600.000.000.000,- kemudian tadi ada beberapa kebijakan Bu Menteri yang *merefocusing* di internal Kementerian Sosial ya, yang di antaranya tadi untuk gedung dialihkan untuk kursi roda elektrik, dan motor niaga dan sebagainya, itu memang kebijakan internal. Kemudian yang belum kita dapatkan data tadi dari ibu menteri kira-kira situasi *refocusing* terakhirnya ini gimana dengan Menteri Keuangan? Nanti mungkin ibu bisa jawab.

Oleh karena itu kami persilakan para Anggota per fraksi saya akan beri kesempatan untuk memberikan respon, saran, ataupun masukan terhadap yang Bu Menteri sampaikan tadi, termasuk juga tadi program yatim piatu. Itu saya kira sangat mulia dan pasti kita dukung Bu, anggaran berapa pun yang Bu Menteri sampaikan ke Menteri Keuangan ya pasti kami dukung Bu, nggak mungkin kami kurangi ya bagus sekali itu, mulia sekali itu. Karena memang yatim piatu itu biasanya dikelola oleh lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan di daerah yang belum banyak tersentuh oleh pemerintah. Kalau ibu sudah memulai saya kira ini legesi bu Risma bahwa di jaman Bu Risma itu yatim piatu bisa di benar-benar negara hadir melalui kebijakan anggaran.

Baik silakan dari PDI Perjuangan, silakan Pak Paryono, nanti siap-siap dari Golkar. Silakan Pak Paryono.

## **F-PDIP (PARYONO, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati ketua dan Pimpinan segenap Anggota Komisi VIII.  
Bu Menteri beserta jajarannya,

Sudah kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, sebenarnya kami dari Komisi VIII seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, kami sangat mendukung. Baik itu dalam *refocusing* yang diarahkan untuk hal-hal yang lebih penting khususnya tentang yatim piatu. Namun demikian data-data yang disampaikan sama Bu Menteri belum lengkap, maka kami menunggu bagaimana data ini segera disampaikan dan sebagai bahan baku ibu menteri tentunya untuk pengajuan kepada Kementerian Keuangan. Dengan *refocusing* yang disampaikan kami berharap *refocusing* ini tidak terjadi di Kementerian Sosial. Karena *refocusing* ini akan berpengaruh terhadap apa itu, pertumbuhan apa itu target pengurangan kemiskinan.

Jadi kalau dari anggaran Kementerian Sosial ini dikurangi, apalagi yang untuk penanggulangan kemiskinan ini akan berdampak akan meningkatnya angka-angka kemiskinan. Sehingga ini Bu Menteri perlu juga melobi Kementerian Keuangan kalau perlu untuk anggaran ini bisa ditambah. Tentunya Komisi VIII akan mendukung penuh, karena ini adalah menyangkut kehidupan orang miskin yang ada di Republik ini, apalagi daripada dampak Covid-19 ini. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Paryono dari PDIP, kami lanjutkan dari Fraksi Golkar, ada Pak Ali silakan Pak Ali.

## **F- P.G (MUHAMMAD ALI RIDHA):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII.

Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati ibu Menteri Sosial dan seluruh jajarannya.

Pertama tadi sudah disampaikan di pembukaan oleh Pimpinan, bahwa saya sendiri langsung tadi agak kaget, kemudian apa anggaran Kementerian Sosial ini. Yang semestinya kita harus dukung untuk ditambah, malah berkurang cukup besar, kurang lebih tadi kalau nggak salah Rp3.000.000.000.000,-? Menurut kami Bu anggaran Kementerian Sosial semestinya harus ditambah dan saya mohon juga kepada rekan-rekan dan Pimpinan untuk memberikan dukungan, untuk penambahan anggaran tersebut. Di mana di masa Covid ini, salah satu kementerian yang menyentuh langsung terhadap keperluan-keperluan yang menimpa masyarakat saat ini, di masa pandemi ini adalah salah satu Kementerian Sosial.

Mungkin saya tidak akan menyebut kementerian mana yang harus dikurangi, tetapi tidak di Kementerian Sosial, kita akan mendukung, dan saya harap juga dari teman-teman yang lain khususnya Pimpinan juga, bisa memberikan dukungan tadi pak ketua sudah menyampaikan untuk memberi dukungan tambahan anggaran bukan tetap pun kita tidak berat, nggak apalagi dikurangi ibu Menteri. Jadi insya Allah kita mendukung, apalagi kita tahu fungsi kementerian dan beberapa saat belakangan ini kita mengikuti perkembangan secara intensif kerja-kerja ibu menteri beserta seluruh jajarannya ini luar biasa dan itu sangat diperlukan dan ditunggu oleh masyarakat.

Yang kedua Bu Menteri terkait tadi bantuan untuk anak yatim, tentu tadi sudah disampaikan oleh rekan kami dari PDIP dan Pimpinan juga bahwa kita mendukung sekali untuk bantuan anak yatim. Tentu nanti pertanyaannya Bu Menteri mekanismenya itu nanti seperti apa? Apakah nanti anak yatim yang akan dibantu itu adalah misalnya anak yatim yang orang tuanya tentu Covid, nah memastikan orang tua Covid bagaimana? Itu seluruh anak yatim, tidak dibatasi oleh orang tuanya Covid, oke. Tadinya kalau itu karena Covid Bu Menteri karena kebetulan saya berasal dari Dapil Madura, di Madura itu banyak sekali orang-orang yang meninggal itu tidak meninggal di rumah sakit, sehingga akan kesulitan mendata bahwa ini anak yatim, anak yatimnya sudah pasti tapi bahwa karena Covid itu yang sulit Bu. Iya karena saya kemarin ini di saat reses turun ke Dapil itu di beberapa desa, malah saya sangat kaget Bu Menteri itu 1 hari itu puluhan. Itu satu desa, bahkan saat ini Kepala desanya sedang Covid juga sekarang, karena hari-harinya dia harus *ngurus* warganya. Nah maksud saya kalau itu bukan, artinya pukul rata bukan anak yatim yang orang tuanya Covid saja, ha itu selesai, maka ini tidak perlu di ini, tapi kalau karena Covid maka mengklasifikasikan anak ini yatim karena orang tuanya kena Covid itu yang kemudian akan sulit.

Sementara itu saja mungkin kalau ada kabar saya harus lanjutkan. Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Pak Ali Ridha dari Fraksi Partai Golkar, kami persilakan dari fraksi Partai Gerindra Pak Jefry silakan pak Jefry.

#### **F-P GERINDRA (Dr. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi VIII, dan juga Ibu Menteri Sosial beserta seluruh jajarannya.

Saat ini hingga tahun 2021 Kementerian Sosial sudah mengalami 4 kali *refocusing*, yang menurut saya kalau tidak di *refocusing* tentu ini akan sangat bisa membantu jika digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi memang kami berharap ya tentu tadinya jangan di *refocusing*, tetapi kalau bisa itu syukur kalau bisa tetap, atau mungkin malah ditambah. Tentu saya juga senada dengan teman-teman yang lain kalau misalnya ada penambahan tentu kami akan sangat mendukung, karena kalau di *refocusing* ini saya juga yakin dalam pelaksanaan program di Kementerian Sosial akan membawa dampak yang kurang bagus.

Kemudian juga ini dari paparan juga saya lihat ada mengenai terkait dengan kartu sembako, ini ada usulan Pemda sebanyak 5.900.000 ya yang tadi dipaparkan. Nah ini kalau memverifikasi data bahwa si penerima itu layak itu seperti apa? Dan juga berapa penerima KPM kartu sembako ini secara keseluruhan? Ini hanya memastikan bahwasannya bantuan tersebut tepat pada sasaran, dan juga mungkin pertanyaan lainnya apakah masih bisa Pemda atau Anggota Komisi VIII ini mengusulkan kembali KPM yang baru untuk mendapatkan kartu sembako ini?

Kemudian tadi juga dipaparkan bahwasanya Bu Menteri menjelaskan mengenai anak yang kehilangan orang tua, nah ini bagaimana juga cara mendatanya? Saya kalau tadi berdasarkan asumsi ya tentunya kan kalau nanti diajukan harus data riil ya seperti itu, dan juga langkah strategis Kemensos ini dalam memberikan perlindungan terhadap anak yatim piatu ini bagaimana? Dan kemudian yang terakhir saya juga lihat di dari bahan rapat ya, bahwasannya ini Kemensos ini mengategorikan kemiskinan ini ada tiga, ada hampir miskin, miskin, kemudian juga sangat, dan tentu ini bedanya sangat tipis. Nah ini pemberdayaan riil dari Kemensos ini agar status hampir miskin, dan mesin agar tidak menjadi sangat miskin ini bagaimana? Karena kalau misalnya ini tidak direspons dengan cepat tentu angka sangat miskin ini akan menjadi tinggi, dan akan menjadikan permasalahan sosial yang serius. Demikian mungkin dari saya terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Jefri dari Gerindra, kami bersilakan dari Nasdem Bu Wulan.

## **F-P NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan juga rekan-rekan, dan Bu Menteri beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang hadir virtual maupun yang fisik.

Terima kasih Pimpinan. Jadi pertama Bu Menteri kita kelihatan sekali bahwa Bu Menteri dalam penyampaiannya ini banyak yang tidak sesuai, iya kan? Baik data yang belum komplit di kita seperti tadi data yatim piatu maupun yatim yang ditinggal orang tuanya, data yang tadi. Kemudian beberapa yang tadi disampaikan Bu Menteri mengenai BA BUN yang di sini ada penambahan anggaran. Bu Menteri sampaikan Rp2.000.000.000.000,- sedangkan di sini kalau nggak salah, atau mungkin saya salah membacanya tulisannya Rp2.300.000.000,-. Nah ini yang benar yang mana? Data yang ada di dalam draf yang kita terima atau yang disampaikan kepada Menteri.

Terus kemudian karena inikan kalau misalnya kita lihat jelas sekali iya kan, saya mohon juga sebelum acara dimulai tadi kan ada waktu jeda sebelum kita mulai, karena saya tadi datang sebelum acara dimulai banyak sekali di sini yang *nganggur* iya kan kalau memang data untuk rapat hari ini belum komplit, kenapa nggak diutus untuk langsung melengkapi begitu? Jangan sampai terkesan bahwa ini adalah main-main. Kita berbicara kali ini masalah data jadi harus komplit, harus jelas banget, yang sesuai apa yang disampaikan data yang tertulis.

Kemudian Bu Menteri kalau kita lihat bahwa *refocusing* ada 4 kali, di sini ini tadi kan belum disampaikan, kalau misalnya *refocusing* pertama itu seperti apa? Kendalanya di mana? Apa yang sudah dicapai? Itu belum ke-2 ke-3 dan ke-4 nya juga belum kita dengarkan. Karena tadi kita lihat bahwa Bu Menteri hanya menyampaikan *refocusing* yang terfokus kepada Rp5.065.000.000.000,- yang tadi dibagi ke peruntukannya untuk penyediaan alat-alat bantuan aksesibilitas, disitu bahwa adanya alat bantu dan juga pemakaian. Kalau kita ketahui bahwa tadi adalah anggaran sekitar Rp5.000.000.000.000,- jadi itu untuk apa saja? Jadi bidangnya kalau tadi hanya bangunan yang sangat rusak parah itu sekitar berapa tolong kita diinformasikan, terus peruntukannya? Penanganan balai yang dipakai untuk secara keseluruhan itu juga berapa? Kita tidak terdengar sama sekali disini.

Kemudian disampaikan juga bahwa tadi adanya kartu sembako, iya kan, baik itu usulan pemerintah daerah sebesar 5.900.000 KPM, sedangkan tadi kalau nggak salah kita dengar yang disampaikan ibu menteri bahwa cetak kartunya saja sudah memerlukan waktu yang lama. Nah ini ditulis bahwa pembagian kartu sembako itu bulan Juli sampai Agustus awalnya 6 bulan, tetapi kemudian direvisi menjadi Desember, karena Juli sampai Desember baru 6 bulan hitungannya. Nah kalau misalnya cetaknya itu lebih lama atau 6 bulan lebih, ini bagaimana

pendistribusiannya? Dan nanti seperti apa? Karena kita tahu setelah reses kemarin kita mendapatkan beberapa masukan dan kita lihat sendiri bahwa pelaksanaan untuk bantuan di Dapil ini sangat semrawut sekali, bagaimana koordinasi dengan bank Himbara juga nggak pas, kemudian PT Pos sendiri juga iya, sama Bulog dan juga penerima. Nah ini kan kita tidak melihat di situ, jadi tolong pada rapat kesempatan hari ini kita diberikan gambaran yang jelas, temuan-temuan kita yang ada di lapangan mendapatkan jawaban dari Bu menteri, sehingga kita juga bisa meminimalisir dan juga mengawasi pelaksanaan yang ada di lapangan.

Kemudian saya juga sangat setuju sekali kalau misalnya kita tidak di *refocusing* Bu Menteri, jadi karena kita melihat bahwa kebutuhan dalam pelayanan hadirnya pemerintah kepada masyarakat di saat pandemi ini memang sangat dibutuhkan sekali, jadi saya setuju juga kalau misalnya ini harusnya ditambah gitu lho. Terus kemudian yang saya juga tadi mengenai anak yatim atau yatim piatu dengan data-data yang tadi disampaikan, sekali lagi saya berharap tidak berdasarkan asumsi, tetapi sampai detik ini yang masuk. Jadi kan kita nggak tahu, jadi saya nggak ngerti, Apakah dasar dari Bu Menteri menetapkan dibutuhkan anggaran penanganan sebesar Rp3.200.000.000.000,- ini asumsinya apa? Kemudian di situ juga termasuk anak yatim, yatim piatu yang dirawat di LKS dan keluarga tidak mampu sebanyak 4.000.000 sekian, nah ini datanya dari mana? Kalau mengingat tadi bahwa data yang masuk ke kita dari pemerintah daerah kan belum komplit jadi dasar ini apa? Jadi jangan sampai kita menentukan angka-angka di sini hanya berdasarkan asumsi terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bu Sri Wulan dari Nasdem, kita lanjutkan dulu ke Fraksi Kebangkitan Bangsa, Pak Kyai Maman Imanulhaq kami persilakan.

#### **F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.

Ibu Menteri serta jajarannya.

Ada dua hal Bu dari PKB yang pertama memang kita harus menyatakan keberatan soal *refocusing* ini, karena tidak adil tidak rasional dan juga sebenarnya tidak efisien. Bagaimana target penurunan kemiskinan yang 10%, tiba-tiba harus sampai 8% itu sangat mengganggu. Sementara anggaran untuk persenjataan dan intelijen justru hari ini lebih naik, ini kan sesuatu yang tidak rasional. Jadi saya minta Pak Yandri kita harus membuat kesimpulan rapat untuk mempertanyakan ini, dan kalau perlu kita memang meminta mengirim surat kepada Menteri Keuangan tidak hanya Kemensos sebenarnya kemarin kita juga rapat dipimpin Pak Marwan soal perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aneh aja ada kementerian dengan anggaran yang sangat minim disunatnya

sampai 4 kali, kalau Kemensos kan anggaran yang hari ini paling diperlukan untuk masyarakat tapi itu malah disunat kan aneh gitu.

Jadi menurut saya kesimpulan rapatnya harus, tetapi tentu juga soal tadi misalnya, saya setuju Pak Ace, bahwa usulan tentang anak yatim ini menjadi penting. Tapi kita jangan juga terjebak usulan saya adalah bagaimana caranya Ibu Menteri dan jajaran menetapkan saja berapa misalnya target itu, jadi langsung supaya sambil berjalan usulan ini dan kita targetkan tidak nunggu dari usulan daerah. Saya yakin bahwa Kementerian Sosial sudah memiliki data tidak berdasarkan asumsi, tapi data yang sudah ada ditambah anak-anak yatim yang karena Covid yaitu sekitar 16.000 sehingga kita bisa menentukan targetnya. Itu yang pertama ketua.

Yang kedua, saya mengapresiasi ya, kinerja dari Kementerian Sosial saat ini dengan pola komunikasi yang digagas Pak Yandri sehingga banyak persoalan yang cepat terselesaikan. Misalnya di Dapil saya soal difabel, itu langsung bisa di, di apa langsung bisa dieksekusi, ada teman saya yang kalau ibu tadi menggambarkan kendaraan untuk difabel, di tempat saya teman-teman difabel langsung me-modif sendiri. Me-modif sendiri motornya lalu dia gini, dan dia terus berkeliling namanya Aulia dia jadi mahasiswi dengan keterbatasannya di Universitas Nahdatul Ulama, dan dia menjadi pelopor, membangunkan termasuk dia oh ternyata ada yang dipasung di daerah anu, ternyata ada yang anu dan lain sebagainya. Nah itu yang hari ini difasilitasi, terima kasih sekali lagi bu, kita kumpulkan itu di forum-forum anak, forum pejuang difabel dan sebagainya di tempat saya. Nah termasuk juga kemarin kita soal karang taruna terima kasih Pak Edy dan teman-teman Pak Mirza, cuman saya juga agak kasihan bu ke staf-staf Ibu. Kelihatan karena terlalu banyak usulan dari anggota atau dari mana-mana direspons, akhirnya kerjanya terlalu keras menurut saya. Atau karena ini

#### **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Tidak Pak, biasa enak saja dulunya, tidak ada.

#### **F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):**

Oke, kalau tidak bu, kalau datangnya ke Dapil saya sih tidak masalah, coba kalau datangnya ke Dapil pak Marwan, datanya dan lain sebagainya, artinya menurut saya ini sekedar masukan saja yang penting itu adalah bagaimana caranya tadi sebenarnya usulan Pak Ace kalau nggak salah, kita di daerah-daerah itu punya orang yang bisa memberikan informasi, sekaligus mengeksekusi. Jadi yang terpenting itu istilah Pak Bukhari tadi yang penting itu eksekusinya, ini kalau kang Maman sudah diam begini berarti udah beres semua, beres menurut saya. Jujur saja Pak karena saya senang misalnya saya tidak menerima apapun, tapi ketika oh Dapil saya udah beres ini karang tarunanya, dapat laporan dan itu membahagiakan sekaligus bu. Teman-teman difabel dapat *support* ini dan lain sebagainya. nah itu menurut saya pola komunikasi, jadi jangan sampai bekerja keras, tetapi dari sisi eksekusi dan evaluatif seperti yang diusulkan Bu Wulan tadi akhirnya tidak terlihat. Jangan berangkat dari asumsi, jangan juga berangkat dari kerja keras tanpa evaluasi, tetapi lebih bagaimana 10 spirit yang Ibu hari ini garap betul-betul menghasilkan apa yang kita inginkan.

Nah itu 2 poin saya Pak Yandri, Bu Menteri, sekali lagi saya apresiasi kinerja Kemensos hadir di tengah masyarakat apalagi saat pandemi.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Kyai Maman Imanul Haq dari F-PKB, kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrat Pak Doktor H. Achmad

#### **F-PD (F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati.  
Ibu Menteri yang saya hormati beserta jajaran.

Pertama Bu kembali ke Tupoksi dari Kementerian Sosial bertolak di sana bahwa pada hakikatnya ruh dari Menteri Sosial ini adalah pemberdayaan dan penuntasan kemiskinan. Ruhnya disana Bu, filsafatnya disana pemberdayaan dan menuntaskan kemiskinan. Makanya ada program PKH itu, PKH itu memutus rantai, kita mewariskan kemiskinan kepada turunan-turunan berikutnya, jadi program PKH itu sangat efektif sekali. Nah oleh karena itu ibu kami sarankan perlu meyakinkan Bappenas, Menteri Keuangan bahkan Presiden, bahwa penting lho, keberhasilan seorang pemerintahan, kepala pemerintahan itu menurunkan kemiskinan, turun angka kemiskinan itu kan berhasil pemerintahan ini. Artinya apa? Ibu ada di Garda terdepan masalah kemiskinan ini, kalau pemahaman itu sudah satu pemerintah, Menteri Keuangan dan Bappenas saya kira berapa pun nanti pembiayaan yang ibu minta di suport oleh Komisi VIII tidak akan ada *refocusing-refocusing*, sampai 4 kali ini mungkin juga sekali bu. Ibu lagi semangat-semangatnya sekarang tiba-tiba dipotong, dipotong, dipotong gitu kan kasihan. Nah oleh sebab itu saya kira perlu.

Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa pemberdayaan itu sukses, ya saya kira apa yang sudah ibu lakukan di Surabaya, kampung nelayan sudah disulap, kemudian tadi apa istilahnya kampung lontong itu jadi bagus begitu, nah ini lho maksud saya, Kementerian Sosial ini seperti ini lho maksud saya. Ya itu nanti kita kunspek kesanalah Bu, jadi berikan contoh itu untuk meyakinkan gitu lho, ini lho sudah diperbuat gitu. Sehingga dengan apa yang kita lakukan itu mereka terkesima itu. Nah kami sangat sedih juga artinya sebentar lagi mungkin 2022 Ertilahu ini kan mau ditarik BBM ini, nah PUPR itu kan hanya membangun fisiknya saja, sedangkan program Kemensos ini bukan hanya fisik, tapi merubah total kehidupan-kehidupan masyarakat di urban lingkungan itu. Nah itu sebetulnya ujung dari pesan itu bahkan kalau perlu PUPR itulah yang dikurangi itu lahannya ditarik gitu lho.

Jangan nanti di 2022 kita tidak ada, mereka tidak ini saja kan, mereka itu tidak pemberdayaan bagaimana kehidupan ekonominya, Bagaimana karakter masyarakatnya dan seterusnya dan seterusnya. Kan begitu konsep terlalu yang

kita adakan. Ini saya kira perlu sehingga mungkin *mindset* lembaga lain terhadap Kementerian Sosial akan berubah, dengan Ibu Menteri sekarang ini gitu loh. Jadi jangan nanti Kementerian Sosial ini jadi kasir gitu lho, hanya Ibu membayar-bayar gaji aja nanti, sedangkan pemberdayaannya, kemiskinannya muncul. Jadi itu harapan kami kepada ibu.

Dan kemudian mengenai anak yatim kalau tidak salah sekarang Polri sekarang mengadakan pendataan lho Bu. Pihak kepolisian, bahkan akan memberikan bantuan juga, nah ini bagaimana ini, jangan nanti tumpang tindih kita juga programkan, Polri juga programkan nanti sarannya sama, nanti bantuannya nanti bisa doble atau bisa apa. Jadi ini perlu juga dicermati di lapangan, bagaimana, apa namanya? Masalah anak yatim ini? Jadi anak yatim ini, anak yatim piatu, yatim piatu gitu, saya setuju apa yang disampaikan Pak Kyai ini bahwa jangan yang terpapar Covid ya Madura, ya Pak Ridho kami setuju pak. Jadi jangan yang terpapar Covid saja yang kita bantu anak yatim itu, tetapi meninggal dalam masa Covid inipun itu juga kita bantu. Jadi tidak Ada kecemburuan sosial nanti dalam hal ini.

Nah kami itu berapa catatan-catatan saya kira ibu, kami sangat mendukung, yang terakhir program seperti UMKM bu, ini kan yang Rp50.000.000,- dibantu kemarin itu sangat bermanfaat sekali. Nah ini kan sampai sekarang yang 2021 belum ada realisasinya, yang UMKM ini yang Rp50.000.000,- per kelompok itu. Nah ini kalau *direfocusing* ini dimasukan iya kan, pemberdayaan ini bu, itu kan ada Rp50.000.000,- 50 orang berapa, 100 orang dengan dana Rp50.000.000,- iya kan? Rp800.000,- untuk modal, Rp200.000,- untuk biaya lainnya, nah ini kami ini sangat-sangat membantu sekali. Apalagi selama Covid ini dengan Rp800.000,- mereka di sektor riel, informal itu, itu sangat terbantu sekali. Nah kalau bisa yang program UMKM ini tetap dilanjutkan.

Kami kira itu catatan diri kami Bu Menteri, kami suport sekali apa namanya, kami dukung sepenuhnya yang Rp3.200.000.000.000,- itu jangan dipotong, bahkan yang Rp1.200.000.000.000,- itu kita kembalikan lagi Bu Menteri ya, insya allah kami dukung sepenuhnya, karena ini pemberdayaan, kemiskinan garda terdepannya adalah Ibu Menteri. Kami do'akan Ibu Menteri tetap sehat, semangat ya, kami kira demikian terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih pak Doktor Haji Ahmad dari Fraksi Partai Demokrat, kami persilakan dari Fraksi PKS Pak Kyai Haji Bukhori Yusuf.

#### **F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Ibu Menteri dan jajaran yang saya hormati, saya banggakan.

Pertama saya tentu memberikan apresiasi dan do'alah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan khususnya teman-teman di Kementerian sosial yang saya memperhatikan untuk pekerjaannya luar biasa Bu. Ini memang peluang mudah-mudahan ini adalah merupakan satu dorongan semakin kokoh keberadaan kita sebagai manusia yang sangat lemah dengan Allah ini juga penting ya, saya do'ain mudah-mudahan seluruh amal kita menjadi amal baik kita dan amal bagi Bapak/Ibu sekalian tentunya dari dunia sampai ke akhirat nanti.

Bu Menteri ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, pertama dari Fraksi PKS juga sangat menyayangkan adanya pemotongan, kalau istilah Pak Maman ini sunat ya. Kalau kita Bu disunat sekali ya kapok Bu, ini Kementerian Sosial disunat empat kali ini, iya sunatnya empat kali nih. Jadi itu saya kira tidak sesuai dengan politik anggaran secara global, karena politik anggaran kita pada saat pandemi itu sebagaimana di dalam tema besar kementerian keuangan dan juga pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus itu adalah Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Salah satu instrumen terpenting untuk penumbuhan ekonomi adalah ketika terjadinya belanja konsumsi. Belanja konsumsi kita itu Bu bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, sampai 5% hingga 5,5%. Jadi pemerintah sebenarnya onggang-onggang kaki yang penting ketika belanja masyarakat itu berjalan terjadi.

Yang kedua tangguh itu basis paling mendasar adalah keluarga, kalau keluarga itu persoalan pendidikan, kesehatan kemudian masalah konsumsi harian terpenuhi itu akan jadi tangguh negeri kita. Nah karena itu sebenarnya ketika Kementerian Sosial yang tupoksi utamanya, itu sudah tupoksi utama lagi, tupoksi utamanya adalah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan orang miskin tiba-tiba di saat seperti ini dibutuhkan justru ini dipotong, saya kira itu sangat memilukan. Ya saya setuju tadi usulan teman-teman termasuk Maman dan Pak Ahmad dan sebelumnya tadi itu, jika perlu Pak Pimpinan memberikan surat kepada Kementerian Keuangan, untuk kemudian tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran ini. Karena ini akan bisa berdampak kepada dampak sosial lebih luas itu yang pertama.

Nah oleh karena itu Ibu saya punya beberapa catatan diantara *refocusing* tadi kan 5.900.000 ada penambahan ya? 5.900.000 KPM yang kemudian mendapatkan penambahan 6 bulan. Nah ini juga saya ingin menanyakan bagaimana mekanismenya? Jangan sampai kemudian kesalahan berkali-kali ini juga kemudian terus berulang. Apalagi saya melihat ada kegairahan ini sebenarnya Bu, kegairahan di Komisi VIII ini, dalam bekerja lapangan, komunikasi yang begitu intens, yang saya sampaikan di grup dengan Ibu tidak bisa membaca setiap kata-kata tapi luar biasa menteri ini, setiap kemudian apa komentar, langsung kemudian disamber dijawab itu, dan langsung solutif, dan ini luar biasa. Oleh karena itu saya kira, saya berharap nanti dalam pola pendataannya harus betul-betul cermat, mohon kemudian Komisi VIII yang kami juga tahu lapangan disertakan bu, tidak kemudian disertakan dalam *ngrecokin*, disertakan dalam merapikan Bu, tenang aja Bu. Iya merapikan tidak mungkin itu akan bisa apa namanya, tidak rapi kalau kemudian tidak dibangun bersama-sama. Makanya kemudian usulan kami disertakan itu kemudian ya Komisi VIII harus *diuwongke* lah kira-kira seperti itu.

Nah terus dengan itu ketika DTKS yang kemudian bisa kita apa lacak melalui NIK-nya itu saya akan sangat membantu. Membantu bagi masyarakat-masyarakat yang memang berhak atau kemudian sudah tidak berhak tapi kemudian masih ada itu sangat membantu. Jadi kami berharap DTKS yang di *share* itu kemudian dilengkapi dengan NIK-nya. Selain itu juga ada 6.581 unit, ada alat bantu, ada kursi roda, ada motor niaga roda 3, ada tongkat adaptif, ada sensor disabilitas, ini posisinya ada di mana ini barang-barangnya bu? Apakah kemudian setiap orang bisa mengakses, atau kemudian dengan cara tertentu? Ini mohon dijelaskan.

Nah selain itu juga bahwa yatim, piatu dan yatim piatu, menarik ini jadi ada yatim, kemudian piatu dan yatim piatu. Jadi kalau dalam ada istilah Undang-Undang Dasar itu kan ada istilah fakir, miskin dan anak terlantar, jadi ini di dalamnya ada yatim, ada piatu dan yatim piatu. Saya juga setuju kalau kemudian yatim piatu ini segera dimintakan anggaran untuk dibantu, basis datanya adalah cup of dari sekarang misalnya, atau cup of dari pekan depan misalnya, supaya kemudian ada kepastian data. Jadi tidak boleh menggunakan asumsi, nah kepastian data, dan saya mengusulkan khususnya misalnya yatim, yatim piatu yang mereka adalah Nakes, berasal dari orang tua Nakes ini harus mendapat perhatian khusus Pak. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya kalau misalnya disuruh pilih, mau tidak mau, tidak mau tetapi karena itu tugas dan pengabdian maka mereka lakukan, dan karena pengabdiannya itu kemudian sampai dia syahid, syahidah wafat, maka kemudian sudah sepatutnya kita berikan penghargaan. Karena kemudian data ini pasti ada, bahkan saya meng-*collect* data saja dengan cepat Bu, dilingkungan saya sudah mencapai 1.200 anak yatim, ini dilingkungan saja pak, dan itu sudah saya sampaikan itu. Apalagi kalau kemudian semua meng-*collect* data, dan data itu dilengkapi dengan NIK, dilengkapi dengan apa pendidikannya dimana? Alamatnya semuanya lengkap itu bisa diperiksa, ketika kemudian nanti tidak layak, tidak masuk dan seterusnya tetapi kemudian kita berikan data. Ini karena itu kemudian saya mendukung sekali perlu adanya bantuan untuk anak yatim, jangan hanya mengandalkan tadi berapa Rp3.400.000.000,- kalau Rp2.400.000.000,- ini Rp2.400.000.000 ini kan tidak sampai dimana-mana pak, ini saya kira cuma sangat sedikit sekali ya. Saya kira memang seluruh yatim yang karena dampak Covid khususnya ini saya kira perlu mendapatkan khusus, yang mendapat bantuan. Berapa angkanya saya kira basisnya kepada PKH saya kira juga supaya tidak terjadi disparitas saya kira juga pada prinsipnya oke.

Kemudian selain itu kami ketika pas reses juga menemukan beberapa temuan Bu, salah satunya misalnya para KPM yang kemudian terblokir. Karena mereka selama 104 hari tidak bisa mengambil, lalu kemudian itu diblokir, ditengarai itu juga bukan karena KPM itu sudah kaya, atau sudah berduit bukan, tetapi memang ada sesuatu. Karena itu saya mau mengusulkan ini Pak Pimpinan, supaya bank Himbara ini diundang, jadi karena khawatir ini ada sesuatu. Jadi ini bank Himbara-nya mesti diundang ada apa dengan Himbara? Dengan uang-uang orang miskin yang kemudian ditahan di dalam perbankan gitu, ini juga merupakan sesuatu yang kita pertanyakan.

Dan kemudian yang paling terakhir saya kira, mungkin yang terakhir ini tidak perlu Ibu respon sekarang, tetapi saya cuma mengisyaratkan Ibu, saya ketika melihat atau membaca terhadap hasil dari LHP, LKPP tahun 2020 dari BPK ini saya kaget juga bu ini, ini ada kurang lebih sekitar dana Bansos bermasalah

mencapai Rp5.960.000.000.000,-. Lalu kemudian Rp3.300.000.000.000,- di antaranya ditemukan dalam bansos sembako Jabodetabek. Lalu kemudian kedua Bansos PKH tidak sesuai ketentuan sekitar Rp1.000.000.000.000,- diantaranya tidak tepat sasaran Rp241.000.000.000,- penyaluran ke data yang tidak valid Rp110.000.000.000,- dana yang tidak diambil KPM Rp283.000.000.000,- dan kemudian yang ketiga pengadaan dan penyaluran beras tidak sesuai ketentuan Rp4.500.000.000,-. Semalam saya ketemu tetangga saya, ketika di Mushola ternyata kemudian ada orang miskin yang kemudian mereka katakan minta tahun ini, kenapa? karena beras saya banyak kutu, kenapa/ dari Bansos Bu. Ini juga luar biasa ini, saya pikir juga Bulog juga perlu diagendakan Pak, untuk kemudian diundang ini, ada apa dengan persoalan antara yang miskin kemudian dibuat didzolimi seperti ini. Bansos tunai KPM menerima lebih dari satu, saya kira kalau yang menerima orang miskin tidak masalah ini, tapi kalau kemudian salah sasaran.

Saya kira itu ibu yang bisa kami sampaikan, kami mendukung dan kami memberi berdo'a mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Kyai Haji Bukhori Yusuf dari Fraksi PKS, kami persilakan dari PAN Pak Muhammad Rizal.

#### **F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si):**

Bismillahirrahmanirrahim,  
*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.  
Yang kami hormati Ibu Menteri beserta jajarannya.

Yang pertama saya pada dasarnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh anggota Komisi VIII semuanya, kalau bisa tidak dipotong anggaran kepentingan sosial. Tetapi Walaupun demikian kita memahami juga ketika menteri diminta untuk pemotongan harus dilakukan pemotongan. Dan saya lihat untuk sementara ini cara pemotongan Bu Menteri sudah bagus menggunakan belanja bantuan sosial, yang mungkin tidak terlalu diperlukan. Apalagi sisa dari pemotongan itu dialihkan misalnya untuk kursi roda elektrik, dan kemudian tongkat dan lain sebagainya untuk disabilitas. Saya kira itu kita setuju Bu, saya kira memang ini harus diperbanyak untuk kebutuhan-kebutuhan lain bukan hanya untuk disabilitas saya kira. Nah itu juga kalau ada sisa-sisa anggaran yang lain juga dialihkan kepada untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya.

Kemudian yang kedua yang terkait dengan revisi anggaran, saya lihat termasuk yang saya lihat revisi anggaran ibu ini harus dikawal Bu. Kita lihat di Rutilahu sampai saat ini kan masih posisi anggarannya kalau tidak salah, kalau salah saya dikoreksi itu Rutilahu Rp15.000.000,- sisanya itu di dilakukan revisi, tapi sampai saat ini mungkin belum, belum di situ ya kira-kira? Jadi kami juga

dapat informasi bahwa memang dana Rutilahu itu yang pernah disampaikan Ibu Rp20.000.000,- sekarang posisi masih Rp15.000.000,- mudah-mudahan saja nanti disetujui oleh Menteri Keuangan penambahan itu. Jadi saya kira harus dikawal juga Bu yang revisi yang ibu lakukan sehingga di lapangan kita tidak berbenturan, tidak berbenturan terutama dari dinas sosial yang mengatakan ini Rp15.000.000 Pak bukan Rp20.000.000,-. Jadi informasi yang dari ibu saya lihat ibu memang larinya kencang, tetapi bawahnya agak tersendat Bu, jadi harus saya kira pak Dirjen maupun Sekjen harus mengikuti kencangnya lari Bu Menteri. Saya lihat bermasalah di lapangan Bu, bermasalah.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan data yatim piatu, data yatim piatu ini saya kira harus betul-betul didata, bila perlu dari kelurahan harus didapatkan itu, karena saya koordinasi dengan beberapa lurah yang ada di lingkungan kami, mereka juga sudah mulai mendata. Dan bahkan mereka membutuhkan bantuan kalau ini dilakukan sesegera mungkin saya kira akan lebih baik.

Nah terkait dengan data ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh para Pimpinan tadi Pak Ace jangan asumsi Bu. Karena saya ke Dinas Sosial itu data yang dari kantor pos itu sejak tahun 2014 katanya, terutama di Banten Bu ya, tempat saya, data itu terus menerus tidak ada *update*-nya, tidak ada perubahannya. Saya kira ini perlu dilakukan *update* data-data yang terutama di kantor pos itu pembagian sembako. Ini sebagai masukan saja dari kami pada ibu.

Kemudian Jujur saja yang menerima sembako ini Bu, masih banyak yang seharusnya mendapatkan tetapi tidak mendapatkan. Ini kami kebetulan jalan-jalan ke beberapa masyarakat itu ternyata masih banyak yang belum mendapatkan, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan data yang ada di masyarakat itu, termasuk tadi yang yatim piatu saya sarankan supaya betul-betul data ini didapatkan dari bawah, dari bawah sehingga mereka merasakan apa yang dilakukan oleh menteri ini.

Saya kira itu Sebagai tambahan dari tadi sudah banyak dijelaskan oleh anggota yang lain Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Muhammad Rizal, terakhir dari Fraksi PPP ada Pak Muslich atau Pak Miftahul, Pak Kyai Muslich silakan.

#### **F- PPP (K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN):**

Ya terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan yang kami hormati beserta para Anggota Komisi VIII DPR RI,

Kepada Ibu Menteri beserta jajarannya, langsung saja kita kepada Bu Menteri beserta jajarannya, yang pertama yang kita tanyakan adanya pengurangan anggaran karena pandemi Covid-19, saya berharap tidak

mendistorsi program dan kegiatan Kemensos, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat. Sebab dengan pandemi ini tingkat kemiskinan semakin meningkat, oleh karenanya segala permasalahan yang terkait dengan bantuan sosial, peningkatan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat miskin harus dikawal betul. Dan proses-proses administrasi tidak terlalu rumit, masyarakat juga sudah susah, jangan sampai karena hanya untuk mendapatkan bantuan harus mereka tambah susah lagi karena urusan administrasi dan yang sulit.

Yang kedua belakangan banyak diberitakan, bahwa keluhan-keluhan mengenai bantuan sosial kalau di susun berkasnya bisa satu meter katanya, termasuk juga masalah pencarian bantuan oleh perbankan. Kemensos adalah lembaga besar, artinya permasalahan tersebut tidak perlu kiranya terlalu banyak diberitakan ke mana-mana, yang penting bagaimana hal tersebut segera teratasi dan jajarannya Kemensos dalam keadaan pandemic seperti ini harus melakukan kerja sama yang harus harmonis, dengan pemerintah daerah, dinas sosial di daerah. Jangan sampai semuanya nampak hanya dilakukan sendiri dari pusat itu dia.

Yang ketiga berkenaan dengan pembahasan mengenai RUU Penanggulangan Bencana, kami Komisi VIII sudah sepakat untuk memberikan wewenang kepada Menteri Sosial RI untuk mengatur berbagai jenis bencana, seperti bencana sosial, dalam DIM RUU tentang penanggulangan bencana. Artinya keterlibatan Kemensos sangat vital dalam menentukan arah dari pembentukan RUU ini. Kehadiran RUU diharapkan semakin mengefektifkan penanganan bencana ke depannya termasuk dalam anggaran jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih anggaran hantar pemberian maupun badan oleh lembaga yang lainnya terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak kyai Muslih Zainal Abidin dari Fraksi PPP semua fraksi sudah, karena kita ada agenda nanti dengan Komite 2 DPD, kami lanjutkan dengan bu menteri, kami silakan dari meja Pimpinan Pak Ace, kemudian silakan Bu Diah.

#### **WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati ibu Menteri Sosial beserta jajaran.

Teman-teman Pimpinan Komisi VIII beserta para anggota.

Di tahapan ini saya melihat Kementerian Sosial hampir di semua kebidangannya ini cukup menjadi perhatian nasional ya, dari mulai Bansos, PKH, BST lalu juga apa inisiatif Bu Risma untuk memadukan persoalan pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan, ini saya pikir satu klaster baru baik pendekatannya mungkin nanti masuk ke PKH ataupun Dayasos. Dan berbagai

inovasi juga ditemani Pak Hari tentunya direhabilitasi sosial seperti memadukan teknologi untuk disabilitas, menguatkan teknologi iya kan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih teknokratik dalam menyelesaikan berbagai persoalan, dan juga *empowering* ya pemberdayaan balai-balai sosial, menjadi satu ruang untuk pemberdayaan sosial. Nah ini kerja yang memang butuh intensitas yang sangat tinggi, itu yang kita lihat beberapa bulan ini, itu hampir semua ya, hampir semua kerja Kementerian Sosial ini cukup apa ya energik gitu ya, menurut saya. Dan tentu berbagai pembenahan juga dilakukan oleh Bu Risma gitu ya. Dan ini memang ketika kita bicara *refocusing*, nah pertanyaannya kan apa yang mau di *refocusing* gitu? Di tengah semua kerja yang intensitasnya tinggi, pasti ada dampaknya gitu, ibaratnya orang lagi ngegas tiba-tiba disuruh ngerem.

Nah menurut saya ini sayang gitu, di tengah momentum gimana baik pemberdayaan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial gitu itu menjadi mendapatkan sambutan yang cukup baik dari perhatian publik. Nah ini menurut saya ya saya sepakat dengan teman-teman kayaknya momennya nggak pas, kalau hari ini *refocusing* itu dilakukan di Kementerian Sosial. Angkanya itu kan ada sekian ratus miliar kalau ditotal tadi di laporan ini Rp1.600.000.000.000,- ya untuk kerja-kerja secara keseluruhan mungkin tidak signifikan kalau kita bicara ini angka. Tapi kalau kita pelajari lagi lebih dalam ini sebetulnya banyak sekali hal penting di dalam anggaran itu. Nah jadi kalau berpikrnya dalam *refocusing* itu induktif dari yang mikro ini dampaknya kemudian akan menjadi besar. Itu satu kenapa kita melihat *refocusing* ini agak berbahaya untuk Kementerian Sosial, karena kerja-kerja kecil yang dampaknya luar biasa terhadap ketahanan sosial masyarakat.

Yang kedua yatim piatu saya juga mendapatkan pesan dari Ibu Ketua DPR untuk benar-benar memperhatikan anak yatim piatu dan alhamdulillah itu tersampaikan dengan baik ke Bu Risma, sehingga Bu Risma membuat dari, dari *good will* ya dari semangat baik kita semua itu, bagaimana kira-kira menyusun suatu kerangka anggaran di tengah waktu yang sedang berjalan, karena ini belum masuk ke dalam rencana anggaran selanjutnya sebelumnya. Nah ya alhamdulillah ada inisiatif-inisiatif dari Bu Risma, walaupun kita paham kalau bisa memang anggarannya bisa lebih. Karena untuk selevel Kementerian yang puluhan triliun anggaran yang Rp2.000.000.000,- sekian itu sangat kecil. Nah tapi yatim piatu itu pendekatannya ada yang sifatnya santunan mungkin, atau nanti juga PR berikutnya adalah pola pengasuhan. Pengasuhan apakah ada orang tua asuhnya? Apakah keluarganya? Nah lalu integrasi juga dengan beasiswa. Ini artinya akan jadi satu program sendiri kalau kita bisa *push* sekarang alhamdulillah, tapi kalau misalnya ini agenda 2022, ya ini bisa jadi satu, satu program yang memang kita *support* benar gitu.

Na rumah tidak layak huni memang PU itu luar biasa jumlahnya, nah pertanyaannya sebetulnya kerangka berpikir dari bantuan perumahan di PU itu terintegrasi tidak dengan persoalan kemiskinan? Pendekatannya apakah lebih tata ruang teknokratik gitu ya? atau lebih bicara bantuan terhadap intervensi terhadap kapasitas warga untuk bisa membeli rumah atau mendapatkan hunian yang layak huni. Nah ini tentu juga harus berjalan beriringan dengan data kemiskinan kalau kita baca. nah datanya apakah di pemerintah daerah itu sinkron dengan persoalan solusi dari bagaimana menciptakan ruang hidup yang layak bagi warga negara yang dalam hal ini adalah miskin kategorinya. Nah ini yang menurut saya juga harus perlu juga gitu sebetulnya sinergi, karena yang di yang

dibahas di dalam pemenuhan perumahan di PU itu tentunya juga nggak bisa lepas dari kebutuhan rumah warga untuk layak huni, dan itu ada miskin kota, di kemiskinan di pedesaan, nah itu menurut saya nggak bisa juga lepas gitu.

Nah jadi beberapa poin ini memang intinya adalah sebetulnya di tengah kebutuhan penambahan anggaran, penambahan anggaran ya, karena banyak inovasi, banyak kebutuhan yang kemudian menjadi kebutuhan riil dari kerja Kementerian Sosial. Nah tiba-tiba ini dilakukan pemotongan menurut saya alasannya juga kita tidak mendapatkan alasannya yang *clear*, karena sifatnya kan general ya di berbagai kementerian. Nah mungkin pola dari *refocusing* anggaran yang diusulkan ini harus kita turunkan kembali apa dampaknya itu, dan kalau dampaknya itu signifikan bahaya ya menurut saya ya kita bisa jadi Kementerian Sosial yang tidak, tidak pas itu untuk mengalami *refocusing* anggaran. Artinya *refocusing* di sini pengurangan anggaran, kalau bisa malah penambahan anggaran di tengah persoalan kemiskinan akibat pandemi ini, toh enggak bisa dipungkiri itu menjadi perhatian kita bersama. Jadi demikian dari saya pak ketua terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bu Diah, kami persilakan Pak Ace Hasan Syadzily dari Golkar.

#### **WAKIL KETUA KOMISI VIII/F-PG (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Ya terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua dan para Anggota.

Ibu Menteri beserta Para Jajaran Eselon I yang saya hormati,

Pertama sebenarnya saya ingin tahu dari *refocusing* ini yang terdampak dari masing-masing setiap unitnya apa saja bu? Ini penting untuk kita tahu, karena kalau empat kali dilakukan *refocusing* berarti disini sih sebetulnya sudah ada penjelasan secara umum, di masing-masing unit kerjanya ya. Misalnya di Setjen Rp200.000.000.000,- kemudian Rp6.000.000.000,- tahap ketiganya Rp777.000.000.000,- tahap keempatnya Rp140.000.000.000,- berarti asumsinya maka ada beberapa program yang memang harus mengalami proses pengetatan begitu ya, atau bahkan dihilangkan program-programnya itu.

Demikian juga misalnya di kementerian, eh di unit-unit kerja yang lain, nah kalau kita tahu secara lebih rinci tentu kita bisa membantu untuk bisa menjelaskan dampaknya yang paling besar terhadap langkah-langkah atau implementasi operasional dari Kementerian Sosial letaknya di mana saja gitu. Ya walaupun di dalam halaman tidak tahu halaman berapa ini, *refocusing* anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 disini ada keterangan bahwa telah memperhitungkan realisasi anggaran masing-masing program, anggaran wajib tersedia untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi, anggaran belanja yang masih dalam status blokir, belanja modal yang belum kontrak dan bantuan sosial non program *paint* itu. Penjelasan-penjelasan ini kan sebetulnya masih belum bisa menggambarkan secara utuh implikasi dari *refocusing* ini ya.

Ibu Menteri ini mohon sebetulnya saya ingin mengkritisi apa sih dampak yang paling membuat *refocusing* ini, sehingga membuat Kementerian Sosial harus bekerja lebih ekstra. Tapi ingat bahwa Kementerian Sosial juga mendapatkan BA BUN yang cukup besar, gitu ya. Jadi seperti yang digambarkan oleh ibu tadi bahwa ada penambahan untuk BST selama 2 bulan Mei, Juni sebesar berapa ini? Rp2.000.000.000.000,- atau Rp2.000.000.000,-? Harusnya kan Rp2.000.000.000.000,- ini, di sini ke ditulisnya Rp2.000.000.000,- ini kan, ini sekali fatal sekali Bu di halaman ini ya, ini harusnya Rp2.000.000.000.000,- ini tidak bukan, tidak mungkin ini Rp2.000.000.000,- ndak mungkin BST diberikan dalam, ini fatal Bu hati-hati ini anggaran ibu. Ibu harus tegur stafnya nih bahaya ini.

Yang kedua misalnya soal BA BUN dalam proses revisi ini juga besar, hampir Rp6.000.000.000.000,- Rp6.317.297.000.000,- demikian pula misalnya dengan kartu sembako yang diusulkan oleh pemerintah daerah, yang jumlahnya 5.900.000 KPM, itu Rp7.000.000.000.000,- besar juga ini, gitu belum Ibu saya dapat info bahwa Kementerian Sosial, apa namanya? Pada awalnya akan diberikan mandat oleh Presiden untuk program bantuan beras, tapi ternyata diserahkan ke Kemenko atau apa Bu? Saya kira itu juga harus jelas, karena terus terang saja masyarakat nanyanya ke kita itu soal beras-beras itu Bu. Jadi ini dalam pertemuan yang saya kira semua masyarakat juga mengetahui, memang perlu ada disclaimer soal, karena biasanya kalau soal bantuan beras, itu ya selama ini ranahnya adalah ranah Kementerian Sosial, tapi sekarang diserahkan kepada misalnya Bulog dan PT Pos untuk itu. Nah pertanyaannya adalah dalam konteks ketatanegaraan siapa yang mengawasi mereka? Karena bagaimanapun mereka juga menggunakan dana APBN. Nah ketika misalnya masyarakat pada protes kepada kita, soal beras busuk lah, beras batu lah gitu, kan nggak bisa juga kita bilang bahwa itu bukan urusan kami. Lalu itu siapa yang melakukan pengawasan terhadap mereka?

Jadi saya ingin tentu dalam konteks kita bernegara ini, setiap apa yang dilakukan oleh dalam konteks ranah sosial karena itu adalah domain dari Komisi VIII tentu kami harus juga terlibat di dalam proses pengawasan, karena itu adalah tugas yang diberikan kepada kami. Jadi oleh karena itu Bu prinsipnya buat kami ketika ibu meminta persetujuan untuk *refocusing* kami setuju, dan tentu kami pun juga sangat kecewa, tapi kekecewaan kita juga harus tahu gitu, letaknya dimana sehingga *refocusing* tersebut mempengaruhi terhadap kinerja dari Kementerian Sosial. Karena pada sisi yang lain Kementerian Sosial pun juga mendapatkan tambahan BA BUN cukup besar juga Rp2.000.000.000.000,- untuk program BST, kemudian untuk kartu sembako sebesar Rp6.000.000.000.000,- dan kartu sembako berdasarkan atas usulan Pemda itu sebesar Rp7.000.000.000.000,- kan besar itu Bu.

Nah jadi untuk itu yang buat kami prinsipnya nggak ada masalah kalau misalnya memang itu dibutuhkan oleh rakyat. Yang menjadi masalah itu kalau misalnya, bagaimana proses pendistribusian di lapangan? kan itu. Nah jadi mohon izin Bu nanti kami hari Jum'at Komisi VIII saya akan memimpin kunjungan ke Bandung ya, tapi saya tidak mau di Kantor Bupati, saya ingin langsung kayak ibu deh, saya lihat kantor pos, udah bener nggak mendistribusikannya, nyampe nggak

langsung ke masyarakat? Yang menerimanya betul-betul tepat sasaran atau tidak? Saya kira langkah-langkah seperti yang ibu lakukan, karena selama ini ya mohon maaf ya, karena kita cuma dengar dari misalnya Dinas Sosial sudah terdistribusi sekian ribu, tanpa kita tahu apakah memang distribusinya itu oleh PT Pos misalnya untuk apa, BST ya itu betul betul didistribusikan langsung atau tidak gitu? Pada ini, nah hal-hal semacam ini tentu menjadi konsen kami. Jadi intinya adalah tambahan BA BUN ini, itu pun juga harus menjadi konsen kita ya.

Yang selanjutnya tentu kami mendukung sekali lagi soal penanganan yatim piatu, dan bukan hanya bagi Covid, tetapi juga bagi yatim piatu pada umumnya. Kuncinya sebetulnya adalah ya menurut saya kembali lagi kepada soal koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penerima atau data-data, saya tadi kenapa bersikeras soal data, karena kalau kita tidak memiliki langkah-langkah yang proaktif untuk meminta kepada pemerintah daerah memastikan misalnya jumlah yatim piatu secara lebih faktual, ya jangan berharap hanya terima laporan saja susah Bu. Ibu tahulah gitu bagaimana kadang-kadang kalau ketika ibu sebagai walikota kan pasti punya daya dorong yang kuat terhadap Dinas Sosial, tapi apakah semua kepala daerah memiliki komitmen yang sama terhadap pembangunan sosial itu. Bahkan kalau kita harus jujur misalnya program verifikasi, verifikasi validasi data kemiskinan saja, kan beberapa kali saya mendapatkan laporan ada beberapa daerah yang masih belum melakukan pemutakhiran data. Bahkan ada beberapa daerah yang gak punya anggaran sama sekali soal pendataan, nah ini problem gitu bu.

Nah untuk itu sekali lagi kami tentu sangat mendukung program untuk apa namanya, yatim piatu ini, baik karena ditinggalkan oleh orang tuanya karena Covid, maupun yang pada umumnya. Karena soal pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh diskriminatif harus imparial gitu. Jadi kami berharap tentu skemanya harus diperkuat ya, ini katanya dibutuhkan anggaran penanganannya sekitar Rp3, ini juga Rp3.000.000.000,- Bu ditulisnya, tolong diperbaiki. Tidak disini tidak ditulis dalam ribuan, disini jadi tolong diperbaiki bu nanti, jika kita setuju Rp3.000.000.000,- bagaimana? Cukup buat apa? Itu Dapil saya saja tidak cukup itu bu. Saya kira itu bu, terima kasih Bu.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Baik, Bu Menteri tadi saya lupa memperpanjang, tapi sekarang nggak perlu diperpanjang kita cukup sampai 12.30 WIB saja, kita beri kesempatan kepada Bu Menteri untuk menjawab. Karena setelah ini kita akan ada rapat gabungan dengan DPD RI mengenai RUU Bencana, oleh karena itu kita beri kesempatan kepada Bu Menteri untuk menjawab atau merespons dari semua penanya, tapi kalau bisa global saja bu tidak perlu satu persatu kelamaan lagi nanti.

Kami persilakan Bu.

## **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Terima kasih Bapak, untuk data akan kami perbaiki pak. Kemudian yang berikutnya adalah soal *refocusing* karena kalau di suratnya itu begitu, kalau kita tidak lakukan penyederhanaan maka langsung akan dilakukan pemotongan dari Kemenkeu begitu. Jadi karena itu kami saya terus terang takut untuk program-program ini, saya melindungi program-program yang memang akan menyentuh kepada masyarakat seperti itu. Jadi kami tidak bisa melakukan itu karena memang seperti itu apa namanya konsepnya, karena itu sebetulnya di awal mohon maaf bapak saya, saya ingin menyampaikan sebetulnya di awal itu saya kepingin saat itu misalkan kita merubah oke kita nggak bangun gedung, tapi memang benar turun gitu. Benar turun, oke kita nggak, kita nggak perlu semua saya perlu kita pelototi anggaran itu yang memang ini belum, belum apa bisa di tidak terlalu penting oke kita nggak nggak perlu lakukan tapi itu kita kembalikan, tapi ternyata tidak begitu prosesnya.

Mohon maaf saya, saya pikir seperti di apa namanya, di daerah begitu prosesnya seperti itu, ternyata tidak seperti itu. Jadi apa namanya ada, ada apa strategi yang memang saya harus rubah begitu. Tapi tadi pagi kita diminta *refocusing* lagi menjawab pertanyaan Pak Yandri Rp3.300.000.000.000,- tapi saya jawab, saya nggak bisa lakukan itu kalau itu dilakukan maka yang terjadi kami ini hanya menyerahkan bantuan saja. Kemudian apa, apa, apa yang program kita jadi mohon maaf Bapak, Ibu sekalian saya terus terang tahun ini kami enggak menerima pegawai baru, saya kita tidak ada Pak, dari kementerian, saya ingin memanfaatkan temen-temen ini, karena menurut saya pegawainya jumlahnya besar sekali di Kemensos. Bahkan saya turunkan sekarang ada di balai-balai Pak ada 1.115 orang yang kita turunkan ke balai-balai untuk membantu tadi kalau menangani masalah-masalah tadi supaya responnya lebih cepat, jadi kita turunkan seperti itu.

Nah kemudian untuk yatim piatu, jadi saya, saya pikir memang mungkin target saja bu, seperti yang kita lakukan di misalkan BPNT, PKH kenapa 10.000.000? Kenapa 18.800.000? Karena tadi saya sampaikan saya harus hitung waktunya, kalau saya prediksi misalkan kita bisa nanti disetujui oleh Kementerian Keuangan Oktober misalkan, itu waktu paling cepat, maka sambil verifikasi lapangan untuk pendataan saya akan tadi sudah saya minta revisi. Mungkin juga daerah bingung untuk menjawab ini yatim karena Covid, atau yatim karena bukan, karena tadi disampaikan oleh pak bapak yang dari Madura itu, mungkin saya akan buat edaran lagi ya sudah anak yatim saja begitu. Karena mungkin kesulitan juga membedakan itu, nah karena memang mungkin tidak tahu itu juga sakit Covid apa bukan begitu ya Pak.

## **KETUA RAPAT:**

Ya karena nasibnya sama Bu, yatim karena Covid yang bukan juga yatim juga itu.

## **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Betul Pak, saya makanya dari awal itu saya sampaikan kalau saya jadi Menteri Sosial enggak, enggak mikirin anak yatim saya mati gimana? Itu terus terang yang saya takutkan di awal, tapi alhamdulillah kemarin kita coba, saya mencoba memasukkan di waktu ada Covid itu. Nah apa namanya untuk data mungkin seperti itu buat saja pak, kita target sambil kita perbaiki, karena kalau kita hitung waktunya Bu. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 memang pendataan itu memang dari daerah, dari daerah. Ya memang dengan segala apa namanya? Plus minusnya makanya kemudian kami mempunyai situs Usul Sanggah, jadi kalau usul tadi menjawab pertanyaan pak Romdoni juga Pak Ace, bisa diusulkan lewat disitu, juga bisa menyanggah misalkan ini tidak pantas kenapa dia dapet itu bisa disanggah. Setelah itu baru kita cek apakah benar usulannya itu seperti itu.

Kalau misalkan dari daerah tidak mengusulkan seperti itu memang benar Pak jadi untuk pendataan itu kemarin untuk perbaikan data kami sampai kirim staf ke daerah-daerah, bahkan staff kita sekarang ada di Papua, ada yang di beberapa daerah untuk membantu daerah memasukkan dan memperbaiki data. Memang iya tapi kalau saya, menurut saya sayang kalau duit itu untuk pendataan Pak Ace, karena menurut saya, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menolong sebanyak-banyaknya itu. Lha kalau itu tugasnya, makanya tadi sampaikan Pak Maman itu kecapean, enggak Pak, saya, saya percaya kalau kita niatnya baik pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan ini. Jadi seperti itu Pak, jadi apa namanya untuk *refocusing* memang kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa cuman yang terakhir tadi memang saya tolak, karena kalau itu di bener-bener dilakukan itu saya sampaikan kita sudah nggak bisa Bapak Kementerian Sosial. Jadi hanya mengandalkan Bansos-bansos aja, nah tadi menjawab itu.

Kemudian yang berikutnya jadi untuk KPM yang baru Pak nanti bisa menggunakan situs apa namanya website kita "usul sanggah" jadi bisa masuk di situ. Itu untuk memenuhi yang apa namanya yang tidak tercover, nanti kalau bisa akan Bapak, Ibu ini serahkan ke saya kami yang akan masukkan seperti itu. Kemudian tapi karena usulannya itu harus lewat daerah, nanti masuk ke daerah lagi Pak, baru daerah nanti jadi seperti kemarin kami nolong siapa itu? Itu nggak ada usulannya, jadi kami dorong daerah untuk mengusulkan ini. Kami apa namanya, menangani yang siapa kemarin lansia apa-apa gitu, nah itu daerah tidak mengusulkan rahasia miskin. Mungkin Pak Romdoni, Pak Jefri tadi, nah itu saya masukkan ke daerah dulu pak, saya harus terus ke daerah baru setelah itu kita tarik begitu. Nah usul sanggah juga demikian pula, nanti kita masuk ke situsnya daerah data-datanya daerah untuk usulan itu, seperti itu, supaya kita tetap sesuai dengan undang-undang nomor 13.

Kemudian yang berikutnya adalah itu bapak jadi nanti jam 13.30 WIB itu ada acara dengan TPS saya kepingin presentasi ini Pak. Kebetulan yang memimpin masalah kemiskinan itu Pak Wapres, nah kalau, makanya saya kemarin kan takut waktunya kalau boleh saya mau presentasikan konsep besarnya untuk penanganan kemiskinan. Jadi tapi waktunya mepet begitu, kalau boleh saya diizinkan, karena saya 13.30 WIB saya kenapa Pak? Iya saya bisa presentasikan tentang bagaimana pemberdayaan itu bukan hanya dari sisi fisik, tapi harus semua komprehensif tidak bisa menangani itu. Nah tinggal datanya dimasukkan makanya kemarin nawar-nawar pak kenapa Kamis Pak itu satunya? Tapi ternyata harus Rabu, saya sayang itu Pak kalau saya nggak bisa

menjelaskan ke Pak Wapres, karena supaya konsepnya tidak dipotong gitu lho Pak. Jadi dilihatnya itu misalkan Rutilahu itu ya cuma membangun, kalau saya tidak melihat itu. saya tidak melihat itu.

Jadi makanya saya sampaikan kenapa kemarin saya punya jadwal Agustus harus selesai, supaya kami bisa punya waktu saya ngomong dititiki itu, usulannya dari DPR itu tolong kasih tanda, nanti kita akan turun untuk pemberdayaannya gitu. Jadi kami punya waktu gitu loh Pak, kan saya hitung karena ini pasti tidak, tidak sebentar gitu, tidak masuknya waktunya tidak bisa pendek, saya harus punya waktu komunikasi kamu pengen apa? Begitu, nanti habis itu disusun konsepnya untuk dilakukan pemberdayaan, maksudnya seperti itu pak. Jadi bukan Rutilahu dalam arti memperbaiki rumah bukan, kalau di mereka misalkan kami pengen usaha dagang, maka desainnya adalah di dibuka seperti ada warungnya seperti itu, nanti kalau misalkan dia konsepnya sama bikin di depan saya, saya mau jualan es misalkan, maka kemudian kita bantu peralatan untuk jualan es, bahan-bahan untuk jualan es, mungkin yang beberapa yang sudah di lapangan tahu yang kita lakukan ya pak, yang saya sudah turun itu seperti itu Pak. Nanti kami akan muter Pak, supaya bapak/ibu tahu, jadi ya dibelikan pak misalkan bungkusnya es, apa itu lengkap begitu, nah sehingga dia bukan dalam bentuk dalam bentuk uang, sehingga dia langsung melakukan aktivitasnya untuk bekerja itu. Kemudian jadi ini tadi menyakinkan Pak Presiden ini memang yang menangani kemiskinan itu Pak Wapres Pak, jadi saya harus presentasi ke Pak Wapres. Tapi mudah-mudahan saya nanti bisa waktunya nututi, saya bisa diizinkan untuk itu.

Kemudian yang berikutnya tadi untuk akses kursi roda, silakan Pak saya sebetulnya ingin waktu itu, ingin presentasi ke Bapak, Ibu sekalian silakan kalau mau diajukan. Saya, kita juga tidak apa namanya kalau ada yang butuh, apa namanya bantuan itu silakan kursi roda. Satu untuk kursi roda untuk yang dia masih bisa mandiri, masih bisa mengendalikan supaya tidak tergantung orang lain dorong, maka dia bisa pakai elektrik. Kursi yang kedua, roda yang kedua itu untuk yang *cerebral palsy*, yang punggungnya nggak bisa berdiri, jadi kita berikan kaya sabuk begitu sehingga dia bisa duduk dan dia bisa berdiri. Kursi roda yang ketiga itu untuk yang kepalanya besar, apa namanya? Hydrocephalus, jadi ada 3. Kemudian ada tongkat itu, kemudian ada roda tiga untuk usaha tergantung dia, kalau dia mau jualan, jualan apa namanya? Warung dia jualan sayur, maka bentuknya beda. Kalau dia mau jadi ojek maka bentuknya beda, kalau nanti dia mau itu, nah silakan diajukan kami siap, jumlahnya masih memang masih sedikit Pak. Karena saya konsepnya kemarin tiba-tiba, maksud saya begitu saya jadi menteri begitu, eh sayang ini duit untuk ngapain bangun itu, sudah kita bantu untuk yang disabilitas *monggo* diajukan, silakan.

Kemudian untuk yatim saya pikir semuanya Pak yatim, jadi nanti yatim yang ada di termasuk di lembaga, yatim yang ada di rawat di apa namanya di keluarga, yatim yang ada di ya yang dampak Covid. Sebetulnya ini kalau memisahkan ini mungkin, ini yang dua ngomong tempat dirawat oleh di lembaga dan orang tua, yang Covid itu, ini hanya hitungan saja, nanti kita akan selesaikan. Nah tadi yang disampaikan di temuan di lapangan Pak, saya mohon maaf Pak Muslih saya bukan, bukan mau pamer-pamer gitu bukan, terus terang saya merapatkan itu sampai, saya sendiri yang memimpin, tapi kemudian tidak ada *action*, akhirnya kemudian harus buka. Sebetulnya siapa yang salah? Kalau memang kami yang salah ya kami harus ngakui salah, dan ternyata memang

mereka tidak menyalurkan. Kalau itu disalahkan ke kami terus, ya kan kasihan teman-teman ini, dia saya perintah, saya sendiri Pak yang mimpin, sekarang saya sampaikan contohnya misalkan mereka tidak mau ada tanda “-“ (strip), tidak mau ada tanda “.” (titik) tapi begitu kita ngomong bahwa itu data betul sudah sesuai dengan data kependudukan, tiba-tiba sorenya bisa dirubah. Ini kan ya nggak adil, lha kami harus menangani jutaan orang pak, ada orang dua juta berapa kemarin total? 2.400.000 pak, ya kalau satu-satu begitu kan ya, ya kita kan nggak kerja-kerja yang lain, orang kita rapat itu bisa sehari tiga kali rapat itu. Akhirnya makanya kemudian udah kita turun saja, yang kemarin kita coba di Coklet di Sragen itu, betul ternyata, saya harus menghubungi kenapa diblokir, menghubungi BNI pusatnya kemudian BNI pusat dorong ke BNI di daerah untuk buka, baru dibuka setelah saya telpon. Ya mereka kalau kaya begitu kan ya gimana pak? Memang kenyataannya seperti itu kalau tidak, saya nanti dikira oh Bu Risma tidak kerja, ini ada ribuan yang masih begitu. Datanya sudah saya serahkan, jadi seperti itu Pak, jadi kemudian yang beras tadi menjawab pertanyaan Pak Ace, jadi.

#### **F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Izin Pimpinan sebentar. Bu Menteri melalui Pimpinan terkait yatim tadi Bu, saya kira ya benar bahwa siapapun dan apapun sebabnya ketika orang tuanya meninggal itu kita sebut yatim. Dan juga ketika ibu bapaknya meninggal itu kita sebut yatim piatu, atau kemudian ibunya meninggal kita sebut piatu, tapi saya melihat ini Bu, bagi yatim yang memang itu adalah orang tuanya meninggal karena dia Nakes Bu, ini saya kira perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah perhatian khususnya itu menurut saya ada semacam satu asuransi kepada mereka untuk sampai kepada S1 sarjana. Karena, karena kemudian kita semua tahu mereka adalah pahlawan, mereka adalah pejuang Bu, jadi saya kira berbeda kita menghargai pejuang dengan yang bukan pejuang. Terima kasih Bu.

#### **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Baik, saya, kami akan bahas dengan kementerian terkait untuk konsep ini, saya bukan nolak Pak, tapi kami akan bahas itu supaya *treatment*-nya bisa beda. Jadi kemudian yang beras jadi begini Pak, jadi ini river tahun 2020 tadi sekaligus menjawab temuan itu, itulah yang terus terang salah satu pagi tadi saya sempat masih ngobrol dengan Pak Dirjen, Pak Inspektur tolong apa kita tangani. Saya ditemukan itu pingsan dong Pak, pingsan saya Rp5.000.000.000.000,- pingsan saya Pak, benar itu saya. Jadi pengalaman kemarin, karena pengalaman tahun 2020 Pak, itu kemudian ada temuan beras, beras temuan saya sampaikan saya tidak mau kalau harga CBP, saya mau harga HET karena temuannya BPK. Kenapa nggak pakai HET?

Sehingga saya saat itu belum jadi menteri, tapi saya harus menjawab pertanyaan itu, itu Pak, sehingga kemudian saya paksakan saya mau kalau harga HET Kementerian Sosial ambil, kami akan ini. Tetapi kemudian tidak bisa kalau CBP harganya lebih mahal pak, nanti kena lagi kami, kan tidak *fair* Pak kami yang tidak menikmati kemudian kami yang harus kena kan ndak *fair* saya ngotot seperti itu pak. Ini temen-temen ketakutan semua pak, karena dihitung saat itu oleh BPK,

itu untung saya bisa mengerti, saya mantan PNS gitu Pak. Saya mengerti administrasi, jadi saya ngomong jawabnya begini Pak, jawabnya begini saya tungguin itu Pak Dirjen pojok itu, di pojok itu, jawabnya begini, Pak jawabnya begini akhirnya bisa clear. Lah kalau begitu kan ya berat Pak kami, kalau terus kemudian temuan itu dibebankan, coba satu, satu berapa Pak Dirjen, dianggap berapa satu koma berapa? Rp1.300.000.000.000,- pak perbedaan harga itu, lha kami bisa bunuh diri pak Rp1.300.000.000.000,- bagaimana kami bisa, bisa kembalikan uang itu? Mbok saya turunan saya mati berapa kali itu ya susah kalau Rp1.300.000.000.000,-.

Jadi karena itu kemudian Pak, mohon maaf Pak saya harus lakukan itu Pak, saya sampaikan juga ketakutannya, semua takut Pak, ketakutan semua. Akhirnya ya sudah saya beranikan kalau harga HET saya ambil, tapi nggak, ya saya nggak bisa Pak. Ini terpaksa saya harus bukan pak sebetulnya saya nggak mau buka ini, terpaksa ini harus buka kenapa kemudian kami tidak, tidak di kami. Ya kan nggak bisa kemudian kami yang harus menderita pak, saat-saat apa namanya pemeriksaan, iya kan kasihan teman-teman. Iya akhirnya oke disepakati kami memberikan data, datanya yang kita berikan begitu, karena kalau nggak kami Pak yang kena. Kan kalau hitungannya beda Pak kalau pemeriksa dengan itu, ini Pak Pepen ini ketakutan semua pak kemarin itu semua ketakutan. Akhirnya ya sudahlah saya ngomong gini, ya sudah saya akan apa namanya, sampaikan resikonya punya jabatan saya, kan begitu sampai begitu saya. Resikonya jabatan saya, saya ambil, saya tidak akan, tidak akan itu karena nggak bisa pak, semua ketakutan, karena tahun kemarin itu diperiksa begitu,

Jadi mohon maaf Pak saya terpaksa harus buka Pak Ace, sebetulnya saya tidak pengen buka saya iya.

#### **WAKIL KETUA KOMISI VIII/F-PG (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Dibuka Bu, karena menyangkut dengan kepentingan rakyat banyak, karena kan mereka terima beras dan lain-lainnya, nah mesti tahu siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Jangan kemudian orang punya anggapan bahwa ini kesalahan Kementerian Sosial, padahal Kementerian Sosial tidak tangani itu, itu maksud saya bu.

#### **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Baik begitu Pak, jadi itupun kami juga masih menyiapkan, menyiapkan nanti apa namanya nanti kita mau jaga, bantu jaga seperti itu kira-kira Pak. Kalau untuk yang BUN tadi saya sampaikan yang 2 bulan itu, itu anu pak *given* karena untuk saya juga tidak bisa apa namanya itu, karena untuk apa namanya, untuk penetrasi PPKM itu lho pak, itu dan belum dibagi pak. Makanya saya jadwa Rutilahu harus selesai Agustus supaya bapak selesaikan Agustus, nanti September saya menyelesaikan ini. Boleh dicek di WA (Wathsap) saya group kita, saya menyelesaikan ini bapak turun untuk itu. Siapa-siapa menerima itu begitu Pak.

**F-PD (F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Berkaitan dengan rumah layak huni, Rutilahu itu, itukan ibu sampaikan sesuai dengan pekerjaan mereka atau produksi mereka, tetapi yang kita terima sekarang itu rumah apa adanya itu yang direhap.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Itu Pak makanya kemarin.

**F-PD (F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Tidak boleh antara.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Makanya kemarin waktu presentasi saya, saya mau menawarkan itu, saya mau menawarkan itu pak, tapi ya sudah bapak-bapak tidak bisa dua, ya sudahlah saya jalan, bagi saya setelah itu mau ke bawahnya, setelah Bapak Ibu jalan, saya baru turun gitu lho Pak program untuk pemberdayaannya. Makanya saya dorong secepatnya.

**F-PD (F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

Tidak kalau pelaksanaan ibu masih konsesinya Rp15.000.000,-

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Sudah-sudah sudah lupa saya menjawab sudah, sudah 20.000.000,- tadi pagi sudah saya telepon Pak DJA.

**KETUA RAPAT:**

Tidak maksudnya gini bu, 15.000.000,- nanti yang Rp5.000.000,- nya dari Pak Ahmad karena Dapilnya.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Tidak, tidak, tidak Bapak, tidak sudah ada, tadi saya sudah kontak, tidak, tidak sudah, tadi saya sudah kontak DJA pak di sini di ruangan ini, Pak tidak bisa Pak Rp15.000.000 itu jadi apa itu, saya bilang gitu. Saya di Surabaya yang

harganya murah saja Rp30.000.000,- saya bilang gitu, terus saya bilang terus disetujui Pak, disetujui oh iya bu.

Jadi nanti kalau misalkan uangnya nggak ada Bu nanti dikecilin, ya Pak wes pokoknya saya ngikut saja, pokoknya Rp20.000.000,- nggak mungkin itu sudah, sudah Pak sudah selesai, kalau itu sudah selesai.

**F-PD (F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):**

*Mosok* Menteri Sosial Bu Risma masih Rp15.000.000,- malulah saya.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Sudah *clear*, jadi maksud saya kemarin itu Pak konsep saya begitu, tapi sekarang ini kenapa saya dorong percepatannya supaya saya punya waktu untuk turun, untuk bagaimana pemberdayaannya begitu. Jadi kalau yang nelayan, itu ya mereka kita bantu Pak, misalkan mereka butuh kerambah, butuh apa? Begitu maksud saya Pak. Begitu pak, nanti bapak saya nanti kita cek di anggaran itu ada Prokus, cuman kemarin dikunci Rp2.000.000.000,- saya berusaha buka lagi ke Bappenas ditolak. Pak kecil-kecil melas kita ini, nanti kalau program sudah oke, maksud saya kalau sudah ini ya setuju, kan kita turun ke masyarakat. Nah sudah oke bapaklah yang menyerahkan itu lewat Prokus itu Pak, gitu lho Pak, saya harus buka lagi sebetulnya tidak mau buka.

**KETUA RAPAT:**

Baik, cukup bu? Cukup ya bapak, ibu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Risma akan presentasi di depan Pak Wapres itu juga menyangkut komitmen Kementerian Sosial dengan Komisi VIII untuk pengentasan kemiskinan, saya kira agenda yang tadi sudah kita rencanakan siang ini Bu kita tunda. Dan kita persilakan Bu Menteri untuk terus berjuang untuk meyakinkan petinggi negara ini supaya ikut konsepnya Bu Risma kira-kira begitu. Dan saya, kami yakin itu bisa di sampaikan dengan luar biasa nanti Bu Risma di depan Wapres.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Pak Ketua sebelum ditutup.

**KETUA RAPAT:**

Belum ditutup ini mau kesimpulan dulu ya.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Sebelum masuk kesimpulan maksud saya, ini yang 5.900.000 ini tadi tampaknya belum mendapat respon dari Bu Menteri.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Saya siapkan datanya, saya siapkan datanya itu semua usulan daerah kami nggak, nggak nambah nanti kami siapkan, kami bagi sesuai dengan permintaan itu ada NIK, nama, alamat kami akan siapkan.

**KETUA RAPAT:**

Yang 5.900.000 KPM?

**F-PKS (F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Iya.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Usulan daerah Pak, saya juga tidak mengamati hanya saat itu saya pikir daerah itukan marah-marah Pak, karena ini suruh memperbaiki data terus, kami mengusulkan tidak pernah dapat. Ya sudah saya coba mengusulkan ke alhamdulillah ke Kemenkeu satu itu alhamdulillah beliaunya menyetujui. Gitu Pak.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Saya seperti usulan pak Jefri, apa tidak, inikan Rp15.000.000,- tetap saja melalui Komisi VIII, saya kira tidak terlalu berlebihan kalau kemudian Komisi VIII juga tidak hanya mendapatkan shear data akhir, tetapi juga ikut menge-*share* data itu. gitu maksud saya.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

O nggih monggo, monggo.

**KETUA RAPAT:**

Kalau Komisi VIII kan memang diberi ruang untuk mengajukan data versi kita,

## **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Sudah lama lho Pak sayangnya.

## **KETUA RAPAT:**

Sudah lama ditanya Bu Risma. Jadi yang dari kita juga sama, sama-sama dari daerah juga dari Pemda juga yang kita minta. Ya karena kalau diluar Dapil Pak Bukhori tidak mungkin kita masukkan pak Bukhori karena sama dengan saya Banten 2 misalkan tetap kita fokusnya disana. Jadi 5.900.000 ya Komisi VIII juga berhak untuk ikut nimbrung data dan mengusulkan gitu lho.

Baik Bu Menteri beserta seluruh jajaran, para Pimpinan komisi dan Anggota, kita sudah sampai di penghujung rapat kerja pada hari ini, saya akan membacakan draf Bu Menteri dan para Anggota Pimpinan silakan disimak, nanti apabila ada perbaikan saya tidak akan mengulangi baca dari awal tapi kita akan fokus pada perbaikan itu dan kita sepakati sebagai sebuah kesimpulan.

Saya bacakan.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA  
KOMISI VIII DPR RI  
DENGAN  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2021 – 2022  
Rabu, 25 Agustus 2021**

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia membahas penyesuaian penggunaan atau *refocusing* kebijakan APBN tahun 2021, isu-isu aktual dan alternatif solusinya, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021 sebesar Rp1.668.743.366.000,- dengan tabel seperti tersebut di bawah ini, tahap 1 dari Satker per Satker tahap 1 sampai tahap 4 dengan total Rp1.600.000.000.000,-
- 2) Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai penambahan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara atau BA BUN satu untuk penambahan bantuan sosial tunai (BST) selama 2 bulan Mei dan juni sampai Juni sebesar Rp2.316.312.675.000,-. Dan yang penambahan anggaran BA BUN kedua sebesar Rp13.397.290.200.000,- ini digunakan untuk yang pertama:
  - a. Memenuhi kekurangan anggaran penambahan alokasi kartu sembako selama 2 bulan Juli-Agustus sebesar Rp20.000 perbulan dengan total Rp6.317.297.200.000,-;

- b. Kartu sembako usulan Pemda lainnya bagi 5.900.000 KPM selama 6 bulan Juli - Desember sebesar Rp200.000 perbulan dengan total anggaran Rp7.080.000.000.000,-.
- 3) Komisi VIII DPR RI menolak adanya rencana *refocusing* lanjutan, ini lanjutan harusnya kalau ada 5 dengan pengurangan kita tidak setuju bu, kalau itu akan mengganggu kinerja Kementerian Sosial RI. Komisi VIII DPR RI Menolak adanya *refocusing* lanjutan setelah tahapan yang akan berdampak pada pengurangan anggaran dan target pencapaian program dan kegiatan Kementerian Sosial tahun 2021.
- 4) Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial agar memperhatikan pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Meminta alokasi anggaran dan sasaran untuk perlindungan sosial bagi seluruh anak yatim piatu akibat pandemi, akibat pandeminya tidak usah lagi ini, yaitu piatu saja,

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Sampai yatim piatu saja, termasuk di dalamnya yang terdampak pandemi, gitu ya.

**KETUA RAPAT:**

Ya yatim piatu di antaranya akibat pandemi ya.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Termasuk.

**KETUA RAPAT:**

Ya termasuk akibat pandemi Covid-19.

- b. Melibatkan pemerintah daerah dalam proses pendataan dukungan anggaran untuk perlindungan anak yatim, piatu dan yatim piatu.
- c. Memastikan akurasi data penerima manfaat berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Ini selalu saja kita dorong perbaikan data Bu Menteri.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Iya Bapak ini boleh ditambahkan yang tahun ini atau tahun 2021.

**KETUA RAPAT:**

Kita terus saja Bu, secara terus menerus saja.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Ya kami mengusulkan 2021 bisa.

**KETUA RAPAT:**

2021 gitu ya, “memastikan akurasi data penerima manfaat berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial tahun 2021”.

- d. Memperkuat program dan kegiatan dalam rangka merespons perubahan iklim, potensi bencana, dan perubahan dampak sosial akibat Covid-19.
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas bantuan pangan non tunai yang disalurkan kepada masyarakat seperti beras dan lainnya tadi.

Mungkin ada dari para anggota sebelum saya minta Pak Bu Menteri.

Silakan Pak Bukhori dan Bu Wulan nanti.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Tadi Ibu terima kasih Bu ini ada istilah piatu ya, ini kan kalau kerangka Kementerian Sosial kan disini kan bantuan sosial yang khusus masuk ke sini ya? Kalau piatu itu kan yang Bapaknya eh yang Ibunya tidak ada, biasanya kalau ibunya nggak ada itu bapaknya langsung nikah lagi, nggak ini, ini maksud saya,

**KETUA RAPAT:**

Ya sama Pak Kyai Bukhori dia mau nikah sama siapa? Sama perempuan juga, berarti nikah juga perempuannya. Ya sama maksud saya jangan menyalahkan laki-laki nanti dimarahi orang nanti kita.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Maksud saya jangan sampai salah sasaran kita membantu, itu saja maksud saya, saya setuju.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Setuju saya Pak sudah kita pikirkan itu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Yang dibantu anaknya kan Bu?

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Iya anaknya, makanya mereka nanti punya ada satu kartu, jadi anak itu yang kita bantu.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Ya saya belum selesai Bu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Oh ya ya,

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Kenapa basis yatim dengan piatu beda? Kalau dalam struktur masyarakat kita itu kan penanggung jawab laki-laki, sehingga ketika Bapak tidak ada otomatis yang memberikan pengayoman dalam konteks kehidupan itu kan nggak ada, nah disinilah kemudian kita punya intervensi. Tapi kalau piatu ini kan umumnya konteksnya adalah pengasuhan dalam konteks materi, tetapi konteksnya dalam pengasuhan secara pendidikan kan itu, nah dapatnya itu, walaupun biasanya bahwa anak yang apa piatu dengan yatim pasti biasanya cest itu, misalnya ibu tiri persoalannya nanti di sana, perbantuannya nanti di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di sana maksud saya gitu loh. Kalau di sini saya kira ketika ada bantuan terkait khususnya masalah materi dan non materi itu memang yatim dan yatim piatu gitu. Demikian terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Yatim dan yatim piatu titik tekannya disitu dulu ya Pak Kyai Bukhori ya,

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Nah titik tekannya pada pemberian nafkahnya itu, itu yang saya kira penting dalam pengasuhan penghidupan.

**KETUA RAPAT:**

Tapi banyak juga itu yang ibunya pas ditinggalkan suaminya langsung nikah lagi juga banyak itu datanya, iya apalagi yang masih muda-muda lebih cepat lagi nikah.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Ya berarti yatim dan piatu yang miskin.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan Bu Wulan.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Terima kasih. Jadi hanya mengoreksi dari poin nomor 2, nah di situ kan memenuhi kekurangan tambahan anggaran alokasi kartu sembako selama 2 bulan. Ini nggak di tentu kan berapa jumlahnya, kan ini kan paling tidak hampir sama pengasumsianya dengan yang b, kartu sembako usulan Pemda bagi 5.900.000 ini kan ada jumlahnya. Jadi yang pertama ini boleh jumlahnya dicantumkan di situ supaya jelas.

**KETUA RAPAT:**

Iya Bu betul-betul, yang poin a ini kan berapa Bu? Enggak yang poin a bu, oh iya, oh iya yang 18.8 yang sudah ada di, oh iya paham-paham saya ya, ya, harusnya ini berhenti di bulan Juni bu ya. Oh ya oh ya ya tahu-tahu yang 18,8 itu kan sudah dianggarkan, yang dulu terus maaf-maaf, sekarang ada tambahan 2 bulan dari data 18,8 juta itu ya, baru yang poin b itu data baru, iya dari Pemda. Gimana Bu Wulan?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Iya agak sedikit paham, jadi maksudnya jumlah 6.300.000.000.000,- itu perkalian dari 18 x 2 x 200 kok saya notalnya kok beda Bu gitu loh, makanya saya pertanyakan. Coba saya total lagi,

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

18.8 mohon maaf saya ini emang kalau hitung-hitungan rada bodo, 18,8 Bu.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Iya Bu kayaknya enggak berubah nih kalkulator saya 7,5 sedangkan ini 6,3 iyakan jadi mana yang benar.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Oh maaf, maaf, maaf kekurangan uangnya, terus kekurangannya sisa, oh iya iya mohon maaf saya ingat. Jadi gini Bu mohon maaf jadi termasuk yang *refocusing* itu Pak yang saham itu, itu digunakan untuk tambahan BST. Nah ini juga begitu karena masih ada sisa yang belum terealisasi dibulan berikutnya, itu maka ditambahkan kebutuhannya memang 7,5, nah kita ada yang belum terealisasi itu diambil oleh Kementerian Keuangan sehingga hanya kekurangannya saja yang *direfocusing*, begitu. Contohnya juga ini yang ke berapa ya nomornya tidak, jadi kekurangannya saja tahap ketiga,

Iya yang halaman ini Bu, halaman apa namanya ini kenapa besar 3,1 itu sisa bantuan sosial jadi BST dikumpulkan, PKH, kemudian BPNT yang belum tersalurkan itu diambil untuk menambah bantuan BST yang 2 bulan, ini demikian pula, jadi dari sekian bulan masih ada sisa kemudian kekurangannya yang kemudian dibebankan kepada kita, seperti itu tambahannya.

**KETUA RAPAT:**

Banyak berarti.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Banyak Pak makanya Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Muslih, kenapa saya buka Pak? Saya masuk jadi menteri 2.400.000.000.000,- Pak enggak terealisasi.

**KETUA RAPAT:**

Yang PKH itu?

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Totalnya.

**KETUA RAPAT:**

Total PKH dan BPNT?

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Semuanya iya, nah itu yang sekarang supaya menghindari itu saya turun memecah satu-satu itu, memecahkan masalah di situ. Masalahnya apa? Makanya saya sekarang turun itu termasuk kemarin di Sragen saya juga serahkan datanya itu ada 6000 pak satu kota. 6000 kali taruhlah BPNT 200.000 sekarang diberikan 3 bulan berapa nggak cair pak. Itu kenapa kemudian saya turun ke itu, itu

memecahkan itu, jadi bukan, bukan saya pengen gimana kalau tidak kita rapatkan saja nggak bisa. Begitu Pak mohon maaf Bu.

**KETUA RAPAT:**

Jadi yang Rp6.300.000.000.000,- itu tambahan dari kekurangan kita sisa,

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Jadi sebetulnya totalnya itu 7,5.

**KETUA RAPAT:**

Pokoknya 18.800.000.000,- x 4 saja.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

7,5 tapi karena masih ada sisa anggaran itu di bantuan sosial itu dikumulatikan sehingga kekurangannya itu hanya Rp6.300.000.000.000,-

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Pak Ketua, karena ini menyangkut angka ya dan ceritanya agak panjang saya berharap di definisikan saja, tidak tiba-tiba kita menyetujui 6.300.000.000.000,-. Ini asal usulnya dari mana, tulis saja semuanya, terima kasih.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Betul ketua, karena kalau bahasanya begitu ketua, itu akan salah gitu loh, tadi walaupun tidak muncul di 8 gitu kan.

**KETUA RAPAT:**

Iya betul-betul jadi prolognya yang penting ini, jadi kalau dari penjelasan Bu Menteri itu, dari penjelasan Bu Menteri sebenarnya kebutuhan 2 bulan itu kan Rp7.500.000.000.000,- coba 18,8 x 4 berapa? 7, coba dibuat dulu gitu lho untuk 2 bulan berapa totalnya? Rp7.520.000.000.000,- coba dibuat dulu, dibahasakan dulu gitu lho penambahan kartu sembako selama 2 bulan dengan anggaran 7.520.000.000.000,- nah kemudian tadi ada dana yang tersedia sekitar berapa berarti 7,520.000.000.000,- dikurangi 6.300.000.000.000,- itu dana yang tersedia di Kemensos setelah ada sisiran-sisiran tadi kan? Baru minta ke BA BUN kekurangannya Rp6.300.000.000.000,- untuk 2 bulan.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Itu yang saya maksud bahwa seharusnya *refocusing* itu bisa menjelaskan tentang itu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Nanti kita buat, tapi yang *refocusing* yang pertama kedua saya kurangnya hanya dari pembangunan saja Pak. Tapi yang ketiga karena jumlahnya kebutuhan BST besar akhirnya kemudian kami dari mana kalau kami ambil dari tempat lain, kami nggak punya anggaran lagi. Akhirnya saya minta dari kementerian ya diambil dari sisa ini, karena kalau ngambil dari tempat lain.

**KETUA RAPAT:**

Karena selama ini kalau sisa kan langsung diambil sama Kementerian Keuangan.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Izin Bu supaya narasinya disempurnakan dulu itu, tolong narasinya disempurnakan dulu.

**KETUA RAPAT:**

Iya sempurnakan dulu, ini redaksinya.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Iya ini kan dalam rangka menyempurnakan ini, jadi alur ceritanya ini ceritakan sama Ibu Menteri jadi yang pasti jumlahnya 18.8 ya Bu! Yang pasti jumlahnya itu kan KPMnya, itu dulu.

**KETUA RAPAT:**

Memenuhi kekurangan anggaran penambahan alokasi kartu sembako selama 2 bulan, bagi 18.800.000 KPM keluarga penerima manfaat Rp200.000,- ribu perbulan sebesar 7,5 dan karena,

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Ini terlalu ini terlalu rumit bahasanya. Awalnya gini saja bahwa kebutuhan yang dimintakan di Kementerian Keuangan kan 6.000.000.000.000,- sementara dari hasil *refocusing* yang tersedia berapa? Rp1.200.000.000.000,- gitu, jadi disebutkan saja yang Rp1.200.000.000.000,- yang hasilnya *refocusing* itu ditambahkan dengan ini gitu lho.

**KETUA RAPAT:**

Sehingga kekurangannya sebesar 6.300.000.000.000,- itulah yang diambil dari BA BUN gitu lho. Iya tinggal apa namanya padanan kata-katannya saja gimana cocok tidak?

**WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):**

Jadi ketua berangkatnya dari *refocusing* awal dulu, jadi proses ngikutin prosesnya dari *refocusing* awal kemudian ada penambahan sehingga hasil angka akhir.

**KETUA RAPAT:**

Atau gini saja hasil *refocusing* keempat ada anggaran yang 1,2 ini kan? Hasil *refocusing* keempat sisa anggaran sebesar Rp1.200.000.000.000,- ini gitu lho. Kemudian dalam rangka penambahan alokasi kartu sembako, kartu sembako selama 2 bulan bagi yaitu terus KPM sebesar Rp7.500.000.000.000,- oleh karena itu diperlukan penambahan Rp6.017.000.000.000,-. Sudah nyambung ini.

**WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):**

Dan ini hasil *refocusing* tahap keempat bukan sisa anggaran.

**KETUA RAPAT:**

Bukan sisa anggaran, hasil *refocusing* saja, hasil *refocusing* tahap empat sebesar, sebesar itu, sebesar Rp1.200.000.000.000,- dalam rangka penambahan alokasi kartu sembako selama 2 bulan. Nah karena kurang Bu Menteri minta lagi ke Menteri Keuangan melalui BA BUN tahap kedua kan Bu begitu kan? Jadi Rp6.300.000.000.000,-. Kira-kira begitu nyambung jadi tidak tiba-tiba langsung kurang bu, jadi harus ada prolognya dulu. Karena kalau 18 x 4 saja orang langsung kok ini 7,5 tapi ada 6,3 betul itu Bu Wulan tadi betul. Jadi kalau hitung-hitungan kita tanya Bu Wulan saja nanti, kalau bagi-bagi ke Pak Ace.

Baik, masih ada yang lain para Anggota?

**KEMENSOS RI:**

Mohon izin yang itu hasil *refocusing* keempat bisa berupa sisa realisasi nggak?

**KETUA RAPAT:**

Sisa realisasi. Oh iya, hasil *refocusing* tahap keempat sisa realisasi, ya benar ya penekanan tadi ya, diambil dari sisa realisasi, boleh bagus juga itu lebih penekanan. Oke baik, kamu ngomong tanpa seizin Bu Menteri ini,

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Saya itu kalau hitung-hitungan tidak ngerti Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya oke. Masih ada Bu?

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Belum kata-kata “dalam” itu harus dikasih “dan” itu pak ya kan itu berbeda kan itu kurung tutup dan dalam rangka, gitu kan, iya kan

**KETUA RAPAT:**

Dan dalam rangka, nggak pakai dan Pak Bukhori, karena dalam rangka langsung tidak terpisah di dalam rangka itu, tidak pakai dan dalam rangka penambahan alokasi.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Memang uang yang 250, uang yang Rp7.520.000.000.000,- Apa hubungannya dengan Rp1.200.000.000.000,-

**KETUA RAPAT:**

Iya, jadi gini alurnya coba Pak Bukhori, dari sisa, dari *refocusing* itu ada yang tidak terealisasi Rp1.200.000.000.000,- ada program Kementerian Sosial ini nambah 2 bulan kartu sembako, artinya kan kebutuhan Rp7.500.000.000.000,- kurang dong duitnya, mintalah Bu Menteri ini Rp6.300.000.000.000,- biar cukup dari gitu lho. Jadi kalau Rp6.317.000.000.000,- ditambah Rp1.200.000.000.000,- ketemu lah angka Rp7.500.000.000.000,- alurnya begitu, Rp6.300.000.000.000,- di bawah, kita ini sebenarnya ingin mempertegas pemanfaatan yang Rp6,300.000.000.000,- yang diakun kedua biar menyambung juga ke tetap b. Nah ketika Rp7.000.000.000.000,- ditambah Rp6.000.000.000.000,- maka ketemulah Rp13.000.000.000.000,- yang di akun kedua, jadi biar klop saja hitungan-hitungannya. Masih ada Bu?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Ada Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan Bu Wulan, sebenarnya saya tanya bu Menteri tapi yang *njawab* Bu Wulan yang silakan Bu Wulan, insya Allah jadi menteri nanti.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Tapi jangan Menteri Sosial ya Pak, mumet ini saja mumet kita lihatnya, ini biar Bu Risma saja.

Coba kita lihat di poin nomor 1 Pak Ketua kembali, ini kan di situ ditulis bahwa memahami *refocusing* dan realokasi Rp1.600.000.000.000,- kan berarti, saya hanya bertanya saja, tapi tadi yang 1.200.000.000.000,- kan dipakai oleh point kedua. Jadi yang pemakaian itu yang Rp400.000.000.000,- memang sudah pemakaian Bu? Tahap yang pertama, ini kan yang pertama kan ya hasil *refocusing* dan realokasi anggaran itu kan sebesar Rp1.600.000.000.000,- yang di poin pertama iya kan? Terus kemudian kita turun lagi.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Jadi ibu mohon maaf ya, jadi begini yang *refocusing* tahap 1, tahap 2 itu murni dari anggaran Kementerian, bukan dari bantuan maksudnya bukan bantuan sosial. Bukan bantuan sosial baru nanti yang tahap berapa yang Rp3.000.000.000.000,- itu kita ngambil yang ini seluruhnya itu dari anggaran apa maksudnya bukan bantuan sosial, jadi membangun gedung, apa lagi operasional kita, perjalanan dinas itu Rp1.600.000.000.000,- itu. Kemudian karena kalau dipotong sebesar itu nggak ada dananya, nah baru yang, baru yang apa kekurangan itu, baru dari sisa bantuan, jadi beda apa namanya, beda posnya, posnya beda. Jadi kalau satu yang bantuan itu bantuan, jadi kalau misalkan ada sisa yang digunakan untuk bantuan, nah itu kemudian ketemunya Rp1.200.000.000.000,- gitu. Jadi yang Rp1.600.000.000.000,- itu, itu dari murni dari apa namanya belanja perjalanan dinas, bangun gedung.

**KETUA RAPAT:**

Dukungan manajemen intinya itu Bu ya.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Iya, dukungan manajemen betul, Pak mohon maaf Pak ya tidak hafal saya, iya saya belum hafal, sisa dari Bansos yang belum terealisasi, kami tidak berani motong itu Bu karena *refocusing* kami tidak boleh, kan kami harus konsultasi dulu, tidak boleh kita mengambil dari situ.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Terima kasih.

Jadi hanya mengoreksi dari angka poin 1 dengan poin 2, nah disitu kan memenuhi kekurangan penambahan anggaran kartu sembako selama 2 bulan, ini tidak ditentukan berapa jumlahnya? Kan ini kan paling tidak hampir sama pengasumsiannya dengan yang b kartu sembako usulan pemda bagi 5.900.000 ini kan ada jumlahnya. Jadi yang pertama ini boleh jumlahnya dicantumkan disini kalau kita membaca dari poin 1 saja kan berarti total kan Rp1.600.000.000.000,- ini.

**KETUA RAPAT:**

Harusnya Rp2.800.000.000.000,-

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Iya, maksudnya ada tambahan kan? Ternyata kan lebih, disitu kalau misalnya kita mengacu Rp1.600.000.000.000,- berarti kan itu harusnya Rp400.000.000.000,- sama 1.200.000.000.000,- kan begitu, tapi ini kan ternyata sumbernya lain, kalau yang Rp1.600000.000.000,- tadi sumber yang berbeda, Rp1.2000.000.000,- juga sumber yang berbeda. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan dari atas Komisi VIII dapat memahami penjelasan Menteri mengenai *refocusing* dan alokasi anggaran tahun 2021 sebesar itu berarti kita secara keseluruhan. Kita kan tidak per masing-masing pos gitu lho, yang itu yang saya tanyakan. Jadi supaya nanti kita membaca hasil dari kesimpulan itu secara global dan keseluruhan begitu.

**KETUA RAPAT:**

Atau dibuat poin khusus yang tadi Rp1.200.000.000.000,- ini? Dibuat poin khusus biar menggambarkan bahwa ada apa namanya, *refocusing* dari bantuan sosial yang tidak terealisasi.

**WAKIL KETUA KOMISI VIII/F-PG (Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Berarti tidak ada kaitannya dengan tahap 4 dong Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya ya

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Dan bukan hasil dari *refocusing* jadi bahasanya

**KETUA RAPAT:**

Hasil ini bu, hasil yang tidak terealisasi saja nggak ada *refocusing* itu. Jadi yang Rp1.200.000.000.000,- itu bukan *refocusing*.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Hasil realisasi bantuan sosial.

**KETUA RAPAT:**

Hasil sisa realisasi itu.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Hasil realisasi bantuan sosial sebesar sekian.

**KETUA RAPAT:**

Sisa. Iya-iya hasil, hasil yang tidak terealisasi, hasil sisa realisasi bantuan sosial.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Jangan diawali dari kata-kata hasil deh, sisa saja langsung, sisa saja jangan pakai kata hasil.

**KETUA RAPAT:**

Sisa, sisa hasil realisasi bantuan sosial.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Bukan bantuan sosial yang belum terealisasi bahasanya, kayaknya sisa hasil realisasi sama bantuan sosial yang belum terealisasi, kaya gitu gimana.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Iya-ya ini sisa bantuan sosial yang belum terealisasi ini sebesar, jadi uangnya ada tapi belum terealisasi kan kira-kira kan begitu ya Bu ya. Sementara kekurangan untuk penambahan selama 2 bulan membutuhkan anggaran.

**KETUA RAPAT:**

1.300.000.000.000,- jadi kita mempertegas yang 1 sampai tahap 4 itu yang dukungan manajemen iya kan, yang perjalanan dinas, bangun gedung tadi Bu ya. 1.200.000.000.000,- ini sumbernya dari bantuan sosial.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Atau ditegasin saja yang nomor 1 ya, *refocusing* dukungan manajemen supaya kita.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.)**

Kembali ke point satu.

**KETUA RAPAT:**

Point 1, point 1.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Point satu.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Jangan pakai *refocusing* ini nggak ada urusannya *refocusing*.

**KETUA RAPAT:**

Realokasi anggaran Kementerian Sosial yang dipergunakan untuk misalnya, di bawahnya setelah.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Nah itu yang saya bilang, kita kan itu yang tadi saya pertanyakan.

**KETUA RAPAT:**

Nggak-Nggak sudah benar ini sudah benar saya kira, jadi Kementerian Sosial itu melakukan *refocusing* Rp1.600.000.000.000,- betul, betul itu totalnya betul. Sementara yang Rp1.200.000.000.000,- tadi kan sisa bukan *refocusing* dia, iya-iya.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Makhluk lain dia, iya iya makhluk lain dia bukan *refocusing*, iya betul makhluk lain bukan *refocusing*.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Makanya itu kan diperjelas tadi direvisi dari sis gitu lho pak.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tidak, begini yang poin 1 ini sudah benar, sudah benar, nah kita tadi fokus lagi ke poin 2 huruf a uya kan? Kita mempertegas bahwa Rp1.200.000.000.000,- ini bukan dari *refocusing*, tapi sisa dari bantuan sosial yang belum terealisasi. Gitu kan Pak Pepen ya? Gitu lho.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Tidak tapi hati-hati.

**KETUA RAPAT:**

Karena ada usulan 2 bulan penambahan Juli – Agustus masih kekurangan.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Kalau ditanya *refocusing* Kementerian Sosial berapa Rp1.600.000.000.000,- gitu saja sudah.

**KETUA RAPAT:**

Rp1.600.000.000.000,- gitu lho, Rp1.600.000.000.000,- yang *refocusing*, yang Rp1.200.000.000.000,- ini bukan *refocusing* jadi betul itu pak yang poin 1 ini tidak usah dibuka lagi sudah benar.

**WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):**

Pak Ketua izin Pak Ketua! Ini kalau kita bicara bukan *refocusing* realokasi anggaran dari nota anggaran a misalnya ya nomenklatur 1 ya, misalnya ini dari nomenklatur anggaran a menjadi direalokasikan menjadi BST nah ini kan proses, artinya ada perubahan realokasi anggaran. Nah ini dari mana anggaran ini berasal? Nah itu harus juga *clear*, karena ini kan proses sekali lagi ya, karena ini merubah mata anggaran. Nah jadi ini dari mana Rp1.200.000.000.000,- berasal itu juga harus *clear* gitu.

**KETUA RAPAT:**

Kan sudah dijelaskan tadi Rp1.200.000.000.000,- itu.

**WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):**

Karena itu prosesnya kita belum bahas.

**KETUA RAPAT:**

Dari sisa yang belum terealisasi dari Rp18.800.000,- selama ini gitu lho, yang reguler kan bu ya? Karena perlu ada penambahan 2 bulan karena ada PPKM kan itu bu ya, kira-kira begitu. Makanya Kemensos mengajukan BA BUN 2 sebesar 13, nggak totalnya, 13 karena ada 5.900.000 KPM dari Pemda ini. Maksudnya biar nyambung dengan BA BUN sebesar Rp13.397.000.000,-. 13.400.000.000.000,- itu biar nyambung tadi, dialokasikan untuk BST Rp6.300.000.000.000,- kenapa 6,3? Karena ada sisa yang belum terealisasi 1,2. Kemana sih yang lain yang 7,500.000.000.000,- untuk 5.900.000 KPM yang berasal dari Pemda gitu lho.

Saya kira *clear* ini kalau kita untuk menjelaskan BA BUN itu, jadi poin 2 ini bukan lagi *refocusing* bahasan kita, poin 1 *refocusing* selesai, poin ke 2 ini kita membahas BA BUN Rp13.397.000.000,- buat apa? Ya buat a dan b, itu ya? Oke.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Masih belum ketua, itu yang poin ke 2 coba full ke poin ke 2, itu kan ada 2 angka itu kan, yang 2T dan juga 13T, kalau 13T itu kan penjabaran dari poin a dan poin b, kalau yang 2,3 itu kan disitu hanya menyebutkan bahwa penambahan bantuan sosial BST selama 2 bulan, keberapanya kita nggak ngerti. Maksud saya berapa KPM-nya, jumlahnya itu tidak disebutkan sama sekali, atau bagaimana?

Untuk BST 10.000.000 KPM kali 2 bulan Rp600.000 x 2 x Rp300.000. 10.000.000 ini kan berarti ini angka-angka ini kan banyak yang gak jelas ketua, jadi tolong dijelaskan di sini dulu sebelum kita mengambil kesimpulan untuk yang angka-angka itu tadi.

**KETUA RAPAT:**

Yang mana lagi bu?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Itu yang atas, yang poin 2 kan ada dua angka, kalau yang 13 sudah clear di bawahnya semua, kalau yang 2,3 itu kan tadi kan baru kita tahu bahwa itu adalah untuk 10.000.000 KPM, kita tahunya tadi kan baru 2 bulan saja, jumlahnya kita nggak tahu, tadi Ibu Menteri bilang bahwa 300 x 2 perbulannya 300.000 kan Bu? kalau 300.000 x 2 x 10.000.000 nggak mungkin 2,316 dan sekian, sekian, sekian. Itu ketua.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Itu dari 3, itu lho, sisanya itu lho 3, berapa itu? itu juga sisa seperti itu bu, sisa apa? sisa dari bantuan sosial PKH iya belum realisasi. Seperti itu.

**KETUA RAPAT:**

Iya, iya maksudnya bu Wulan itu dijelaskan juga, jadi kebutuhan BA BUN 2.300.000. yang BA BUN pertama itu untuk menutupi kekurangan 10.000.000 KPM yang belum terealisasi berapa boleh sebutin saja gitu ya, biar nyambung ya? Berapa totalnya itu? Jadi 10.000.000 kali Rp300.000,- kali 2 berapa Rp6.000.000.000.000,- paling tidak. Nah berarti dari Rp6.000.000.000.000,- itu, dibahasakan saja biar tidak ujuk-ujuk muncul angka disitu gitu lho, karena kita cuma ngali-ngali saja bu bagi-baginya yang belum. Kalau nambah, ngurangi pinter semua kita ini, tapi kalau bagi-bagi banyak yang tidak lulus kita ini.

Coba narasinya-narasinya sebesar berapa tadi Rp6.000.000.000.000,- itu lho, coba Rp6.000.000.000.000,- iya nah yang belum terealisasi berapa tadi 3, berapa tadi itu? 3,6, berapa itu 3,614 berapa itu? dari sisa bantuan, dari sisa bantuan yang belum terealisasi sebesar berapa tadi yang belum terealisasi? 3,

**WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):**

Redaksinya mungkin gini, program 10.000.000 KPM ini kebutuhan anggarannya berapa? Di bawahnya diperoleh dari sisa anggaran 2,3 ditambahkan melalui BA BUN sekian. Jadi narasinya diganti, dari besar ke kecil. Jadi kebutuhan anggaran program ini dulu kita bahas, lalu kedua kita punya sisa anggaran Rp2.300.000.000.000,- ditambahkan melalui BA BUN, Rp3.300.000.000.000,-.

**KETUA RAPAT:**

Gini kita langsung fokus saja, jadi penambahan 2 bulan itu butuh berapa? Rp6.000.000.000.000,- kan, nah dari ada sisa anggaran yang belum terealisasi 3,6 itu kekurangannya berapa ya Rp2.300.000.000.000,-

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Tapi ketua kita tanyakan dulu bener nggak? itu kalau, itu kan kita hitung-hitungan kita.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Cuman yang menjadi pertanyaan apakah betul bahwa yang sudah terealisasi Rp3.600.000.000.000,-?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Nah gitu loh, kita tanyakan dulu ke Bu Menteri benar tidaknya, jangan sampai karena kita pengurangan itu pakai kalkulator jadi kita muncul kan disitu seperti itu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

2;57 iya betul ibu, jadi kebutuhannya,

**KETUA RAPAT:**

Tidak yang paling penting itu kan sebab musabab Menteri Sosial minta BUN 1 kan?

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Jadi total kebutuhannya berapa Rp6.100 total kebutuhan awal itu Rp6.138.500.000.000,- itu yang Rp6.000.000.000.000,- untuk penyaluran, yang Rp138.500.000.000,- itu untuk membayar PT Pos itu, iya. Jadi kemudian total sisa Bansos itu Rp3.822.187.325.000,-.

**KETUA RAPAT:**

Coba rubah itu 3,8 bukan 3,6.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Ketua bisa kita minta oret-oretannya juga, karena hanya kita dengar kita tidak ada data gitu lho.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Jadi kekurangannya tetap itu, apa namanya?

**KETUA RAPAT:**

3,8 yang belum terealisasi itu ada 3,8 kalau ada Rp6.138.000.000.000,- ada 3,8, berapa tadi itu, 38 berapa itu, enggak kita ini kan hanya ingin mempertegas, kenapa Menteri Sosial minta Rp2.300.000.000.000,- kan? Gitu lho, untuk 10.000.000 KPM, ternyata hasil pengusulannya itu tadi ada Rp6.138.000.000.000,- kemudian ada sisa yang belum terealisasi ada Rp3.800.000.000.000,- nah kekurangannya Rp2.300.000.000.000,- itu mintalah Kementerian Sosial ke BA BUN 1. Yang terealisasi sebenarnya itu Rp3.800.000.000.000,- karena ada Rp138.000.000.000,- itu. Coba dulu 6.138.000.000.000,- dikurangi 2.316 berapa itu? 6.138 dikurangi 2.316 sekian itu, itulah sisa dari KPM yang belum terealisasi. Makanya Kementerian Sosial minta BA BUN 1 sebesar 2.300.000.000.000,- untuk menutupi kekurangan Rp6.138.000.000.000,- kira-kira begitu bu ya?

Kira-kira gimana bapak/ibu? Redaksinya, saya kira itu sudah menggambarkan kronologis ini.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Ketua!

**KETUA RAPAT:**

Ya gimana?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Kalau kita mau memahami yang dari 10.000.000 dan Rp300.000,- dan 2 bulan itu kan nanti nggak sinkron. Padahal tadi disampaikan Bu Menteri bahwa selebihnya itu kan untuk PT. Pos ya kan, nah itu menjabarkan itu, itu, itu gimana? Kalau misalnya kita kalikan itu tidak sinkron di 6 nya itu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Iya betul.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Jadi salah bacanya nantinya.

**KETUA RAPAT:**

Jadi kalau mau kasarnya kan Rp300.000,- x 10.000.000 = Rp6.000.000.000.000,- gitu kan, maksudnya gitu kan.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Jadi untuk kebutuhan BST 2 bulan dan penyaluran biaya penyaluran.

**KETUA RAPAT:**

Langsung saja biaya penyaluran PT Pos langsung saja.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Dan biaya penyaluran PT Pos sebesar Rp138.000.000.000,- langsung saja begitu, jadi Rp138.000.000.000,- ini terpisah ya itu. Jadi gini total Rp 6.000.000.000.000,- untuk BST 10.000.000 penerima itu, dan Rp138.000.000.000,- untuk penyaluran.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Ketua sebelum di hitung, ini saja yang dipasang disitu sama tulisan ini sudah beda, ya disitu Rp6.138.000.000.000,- disini Rp6.138.500.000.000,- yang bener yang mana?

**KETUA RAPAT:**

Tidak tugas kita menutup kekurangan saja Pak Bukhori, bukan mencari tambahan kita, Nggak kita ingin mencocokkan saja BA BUN 1 ini Rp2.300.000.000.000,- ini buat apa? Biar cocok saja angka-angkanya.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Cuman ini yang ditulis disini Rp6.138.500.000.000,- ada Rp500.000.000,- nya Pak, nah kalau ini kan tidak ada.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Betul, tadi kita sudah tanyakan Pak Bukhori jangan diulang-ulang.

**KETUA RAPAT:**

Oke, oke, oke jadi dari langsung itu, disebut itu yang Rp138.500.000.000,- itu untuk biaya penyaluran melalui PT Pos langsung saja. Nanti biar kita panggil PT Posnya dapat nggak dari itu?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Dipanggil sama Himbara juga ketua, iya kan Himbara sama PT Pos jadi biar kita kenalan, mosok ada bagian.

**KETUA RAPAT:**

Penyaluran melalui PT Pos sebesar ya, oke-oke, itu poin 2, poin 3 saja sekalian dibuat di bawah ini berapa angka di poin 2 itu dikhususkan saja poinnya, ya 2a, 2b saja. Sudah betul itu angkanya tadi karena ada tambahan Rp500.000.000,- tadi, sudah selesai? Yang 382 tadi ditambah 2,3 cocok tidak? Sudah selesai ya? 3.821 ditambah 2.316 ini benar tidak Rp6.138.500.000.000,-? Sudah benar? Itu 3.821.678.325.000,- + 2.361.312.675.000 ketemu nggak di 138.500.000.000,- itu? sudah ketemu? 2a BA BUN 1 penekanannya itu.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Salah Ketua, salah itu sudah kelihatan 8 + 2 saja 0, belakangnya ada iya kan, berarti kan belakangnya 1 tidak 0 itu. yang 78 itu lho dari belakang.

**KETUA RAPAT:**

Sebenarnya gampang caranya 6.138 dikurangi 2,3 itu ketemu itu, berapa itu? Udah? Sudah cocok ini? 3.822.187.325.000 udah oke. Buat 2b poin 2b itu dinaikkan, udah ya belum oke udah BA BUN oke ini ya?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Belum oke turunkan lagi,

**KETUA RAPAT:**

Yang mana?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Turunkan lagi mas, iya kita bicara yang a, itu tadi yang keperuntukannya 385.500.000.000,- kan belum muncul Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Dan penyaluran melalui PT Pos sebesar itu. Jadi kebutuhannya Rp300.000 iya per bulan kan 2 bulan Rp600.000 kan x 10.000.000 Rp6.000.000.000.000,- yang besaran Rp138.500.000.000,- ini untuk penyaluran.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Iya itu kan nggak ada kan, itu kan bunyinya dan penyaluran melalui PT Pos 6, kan, padahal yang untuk biaya penyaluran PT Pos itu kan 138 gitu loh Ketua. Itu kalau itu secara keseluruhan.

**KETUA RAPAT:**

Nggak kalau itu dipisah saja, dipisah per bulan sebesar ikuti saya dulu, penambahan bantuan sosial tunai selama 2 bulan Mei, Juni untuk 10.000.000 KPM (keluarga penerima manfaat) Rp300.000,- per bulan sebesar Rp6.000.000.000.000,- sebesar Rp6.000.000.000.000,- dan biaya penyaluran melalui PT Pos sebesar Rp138.500.000.000,- oke. Enamnya dihilangkan oke gitu ya?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Dibaca dulu keseluruhan, iya kan jadi utuh gitu,

**KETUA RAPAT:**

Masih ada sisa yang belum terealisasi sebesar Rp3.820.000.000,- lanjutnya sehingga diperlukan penambahan sebesar nah masuk BA BUN tadi Rp2.300.000.000.000,- sekian. Oke ya?

Lanjut yang lain?

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Nah itu harus disebutkan juga ketua tahun anggaran itu.

**KETUA RAPAT:**

O, 2021 ya.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Itu jangan sampai ini anggaran kapan gitu,

**KETUA RAPAT:**

Nanti jangan sampai setiap tahun mendapatkan anggaran Rp138.000.000.000,-

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Kita cuma bisa memahami, memahami terus masalahnya.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Semoga Ibu Menteri faham juga gitu lho maksud kita.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Dari tadi cuma paham-paham doang ini,

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Ya makanya kan kita berharap ibu Menteri juga memahami juga gitu kan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Bukhori makanya saya bilang sama Bu Diah, kita memang harus paham, kalau tidak faham masa sudah jadi anggota DPR tidak faham-faham.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Ya yang penting saling memahami gitu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Yang didepan ini bukan Menteri bukan kasir, bagi-bagi

**KETUA RAPAT:**

Ya Mei, Juni 2021.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Koyo ngene kekurangane apa Komisi VIII, wes kei kabeh.

**KETUA RAPAT:**

Sama yang bawah tadi tahun 2021 itu, yang poin b, poin b Juli, Agustus 2021, oke cukup bapak/Ibu? Poin 2 nya sudah tahun 2021.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Dibacakanlah ketua biar mantap.

**KETUA RAPAT:**

Yang mana lagi Bu Wulan yang perlu dibaca? Kita baca angka terus ini baca terus, Rp138.500.000.000,-.

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Dan itu lanjutannya kayaknya titik koma bukan dan.

**KETUA RAPAT:**

Yang mana? Setelah Rp138.500.000.000,- masih ada sisa bantuan. Oke siap, pokoknya kita dengar bu Diah sama bu Wulan saja baru yang memperhatikan Pak Ace nanti.

**WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):**

Lha kalau bapak-bapak kan tahu beres saja Bu,

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Jadi merealisasikan Bu Diah, iya kan. Sudah apalagi ini, ribut angka-angka nggak jelas juga kadang-kadang ini. Ketua jangan kaya gitu ini jelas lho angkanya, jangan bilang nggak jelas dong.

**KETUA RAPAT:**

Sudah jelas belum ini? Sudah jelas belum ini? Kalau sudah jelas mau saya ketok. Sudah Bapak, Ibu, Bu Menteri cukup?

Baik draf yang sangat banyak perubahan tadi tidak perlu saya bacakan lagi dan alhamdulillah sudah mengalami perbaikan sejalan dengan hasil kesepakatan kita maka saya pertanyakan apakah draf yang mengalami perubahan termasuk redaksi dan makna bisa kita sepakati menjadi sebuah kesimpulan? Setuju ya?

**F-P NASDEM (HJ. SRI WULAN, S.E., M.M.):**

Munculin lagi dong.

**KETUA RAPAT:**

Nggak sebelum saya ketok setuju tidak ini?  
Oke harus ikhlas, kalau ikhlas itu selalu ada jalan nanti.

Setuju!

**(RAPAT: SETUJU)**

Bu Menteri beserta seluruh jajaran, para Pimpinan dan Anggota Komisi VIII kita sampai di akhir rapat kerja pada hari ini dengan agenda *refocusing* anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia dan isu-isu aktual. Sebelum ditutup kami persilakan Bu Menteri untuk menyampaikan kata akhir dari rapat kerja ini. Silakan bu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Yang pertama untuk yang karang taruna belum banyak yang belum terealisasikan penyerahannya, saya minta jadwalnya itu. Yang kedua kami juga minta jadwal penyerahan ini, kalau kami hitung kemarin BPMT itu ditarik 3 bulan Pak. Jadi ditarik tiga bulan jadi artinya Juli, Agustus, September saja. Nah jadi September itu saat dia sudah mungkin kekurangan uang, saya takutnya itu nanti ditarik lagi. Nah mungkin September ini bisa kita yang dua bulan tadi tambahan saya juga minta jadwalnya untuk penyerahan itu nanti Pak Sekjen yang kolek, bapak/ibu menyerahkan di Dapilnya yang dua bulan. Karena nggih untuk tambahannya, yang tambahan itu, karena kalau saya hitung dia September itu tidak terima uang. Kan tidak terima Bu karena nanti itu kan Oktober ditarik ke depan, sampai September ditarik kedepan kemarin. Jadi sekarang yang bulan September mungkin bisa kita serahkan di bulan September saya minta jadwalnya.

Itu saja pak Ketua, sama yang untuk apa namanya? Jadwal untuk Rutilahu penyerahan oleh bapak/ibu semuanya saya akan turun setelah itu, untuk memperdalam itu nanti diserahkan lewat prokus itu, kita akan selesaikan dengan prokus. Itu Pak terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik bapak, ibu itu artinya perjuangan bapak, ibu terkait jadwal tadi tolong dipastikan lagi sehingga biar Bu Kemensos bisa menyesuaikan dengan agenda-agenda Komisi VIII.

Baik terima kasih Bu Menteri beserta jajaran, terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Mudah-mudahan kesimpulan ini bisa kita laksanakan secara baik untuk dimasa-masa yang akan datang, dan insya allah kita akan rapat lagi dengan Kementerian Sosial besok siang dengan agenda RKA KL tahun 2022. Dan mungkin kita akan lanjutkan penanggulangan bencana, itu juga menjadi fokus kita.

Oleh karena itu mari dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamiin,  
rapat kerja ini saya nyatakan ditutup.  
Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.38 WIB)**

**Jakarta, 25 Agustus 2021  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197309261997031001**